

**Gerakan GEMA Pembebasan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir
Indonesia di Kota Malang**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD SYAUQI ROBBANI

155120100111030



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN
**Gerakan GEMA Pembebasan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir
Indonesia di Kota Malang**

SKRIPSI
Disusun Oleh:
M. Syauqi Robbani
NIM. 155120100111030

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

o.n

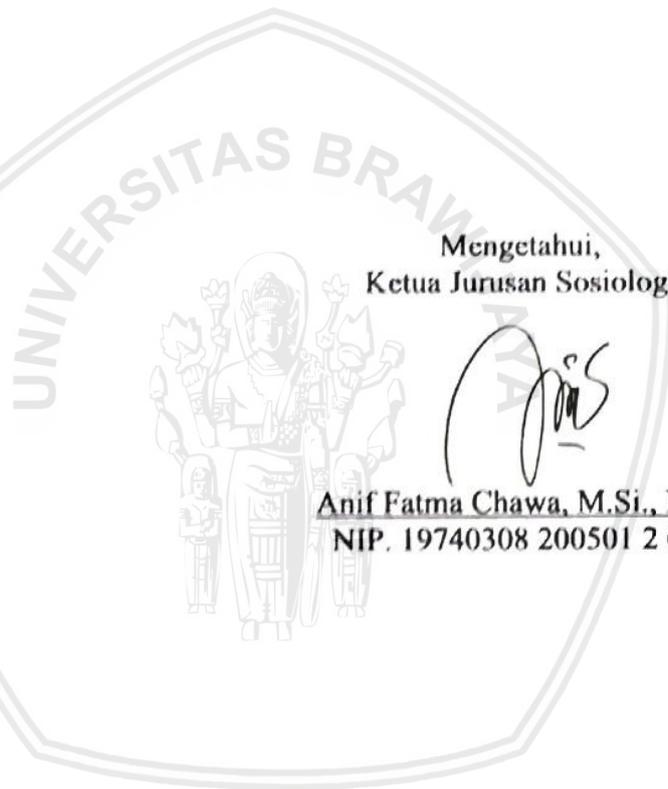


Slamet Thohari, S.Fil., MA.
NIK. 201304 811119 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi



Anif Fatma Chawa, M.Si., Ph.D
NIP. 19740308 200501 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

**Gerakan GEMA Pembebasan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir
Indonesia di Kota Malang**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M. Syauqi Robbani

NIM. 155120100111028

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian sarjana pada tanggal 10 Oktober
2019:

Tim Penguji

Pembimbing Utama

a.n

Slamet Thohari, S.Fil., MA.

NIK. 201304 811119 1 001

Anggota Penguji I

Ucca Arawindha, S.Sos., MA.

NIK. 2013068711182001

Anggota Penguji II

Arief Budi Nugroho, S.Sos., M.Si.

NIP. 197802012006041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



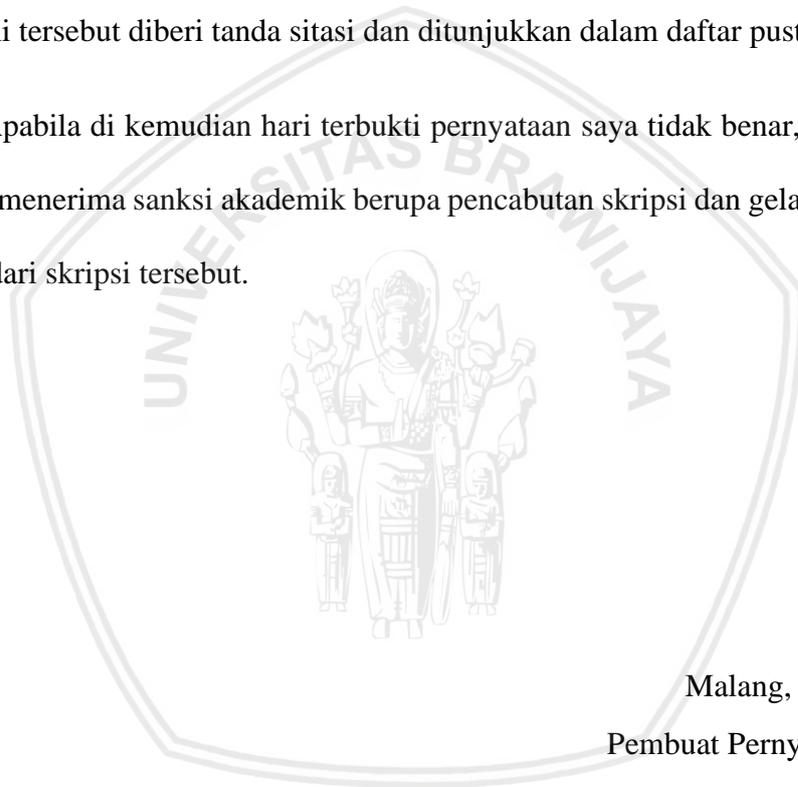
Prof. Dr. Ir. Unti Ludigdo, SE, M.Si, AKJ

NIP. 196908141994021001

PERNYATAAN ORIGINALITAS**Nama : Muhammad Syauqi Robbani****NIM : 155120100111030**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Gerakan GEMA Pembebasan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.



Malang,
Pembuat Pernyataan

M. Syauqi Robbani
NIM. 155120100111030

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Alam Semesta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gerakan GEMA Pembebasan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan tugas akhir skripsi dalam memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan, dukungan, bimbingan, serta pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Subari dan Ibu Hj. Hartini sebagai orang tua, Habib Abdurrahman dan Fatimah Azzahro, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan harapan dan dukungan berupa materi maupun non materi.
2. Bapak Slamet Thohari, S.Fil., MA yang telah sabar membimbing, mengajari, dan memberikan banyak masukan serta selalu menyediakan waktu di tengah kesibukan untuk penulis berkonsultasi.
3. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Teman-teman GEMA Pembebasan Malang selaku subyek penelitian informan, baik informan utama maupun informan pendukung yang telah meluangkan waktu kepada peneliti dan telah banyak membantu dalam penelitian skripsi.
5. Para penulis buku, penulis artikel, peneliti yang penelitiannya dijadikan sebagai penelitian terdahulu pada skripsi ini, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan yang diberikan.
6. Teman-teman Kelas B-Sosiologi 2015 dan segala cerita di dalamnya.
7. Teman-teman Himasigi, teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UB 2017, teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UB 2016, teman-teman Eksekutif Mahasiswa UB 2015, dan teman-teman Kongres Mahasiswa UB 2017 yang memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam organisasi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan sangat terbuka, agar isi dari skripsi ini dapat lebih bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca.

Penulis,

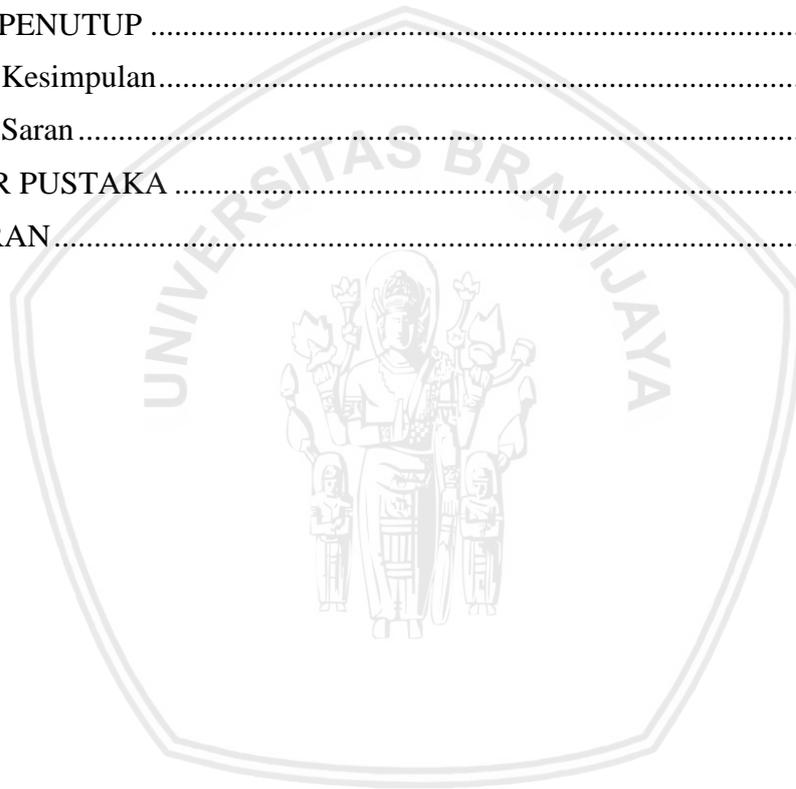
M. Syauqi Robbani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Landasan Konseptual	16
2.2.1. Gerakan Sosial	16
2.3. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Metode Penelitian.....	29
3.2. Fokus Penelitian	30
3.3. Lokasi Penelitian	30
3.4. Teknik Pemilihan Informan.....	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data	31
3.5.1. Observasi.....	32
3.5.2. Wawancara.....	32
3.5.3. Dokumentasi	33
3.6. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM	36
4.1. Hizbut Tahrir Indonesia dan GEMA Pembebasan	36
4.1.1. Hizbut Tahrir Indonesia	36



4.1.2. GEMA Pembebasan	42
4.2. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.....	51
4.3. Karakteristik Informan	54
4.3.1. HNA	54
4.3.2. TSP.....	55
4.3.3. KU	55
BAB V PEMBAHASAN	56
5.1. Gerakan GEMA Pembebasan Malang Pasca Pembubaran HTI.....	56
5.2. Mobilisasi Sumber Daya GEMA Pembebasan Malang	83
BAB VI PENUTUP	94
6.1. Kesimpulan.....	94
6.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komisariat GEMA Pembebasan	6
Gambar 2 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 3 Lambang Hizbut Tahrir	39
Gambar 4 Bagian dari Organisasi HTI.....	40
Gambar 5 Lambang GEMA Pembebasan	43
Gambar 6 Struktur Kepengurusan Wilayah GEMA Pembebasan	44
Gambar 7 GEMA Pembebasan Malang Raya.....	47
Gambar 8 Struktur GEMA Pembebasan Malang.....	48
Gambar 9 Tahap Gerakan GEMA Pembebasan Malang	57
Gambar 10 Bentuk resistensi	60
Gambar 11 Media Pembebasan dan Opini Tempel.....	71
Gambar 12 Dialogika	72
Gambar 13 Aksi yang dilakukan GEMA Pembebasan Malang.....	73
Gambar 14 Publikasi Media Sosial.....	75
Gambar 15 Rekrutmen GEMA Pembebasan Malang Tahun 2018.....	77
Gambar 16 Undangan Aksi 299	89
Gambar 17 Media Umat, Buletin Kaffah, dan Majalah Al-Wa'ie	93

ABSTRAK

Syauqi Robbbani (2019). Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya, Malang. Skripsi Gerakan GEMA Pembebasan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang. Pembimbing Slamet Thohari

Penelitian ini membahas gerakan GEMA Pembebasan pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan dan mendeskripsikan gerakan GEMA Pembebasan Kota Malang. Meskipun pada tahun 2017 badan hukum HTI telah dicabut, tetapi kelompok mahasiswa yang ada di kampus-kampus ini salah satu cikal bakal HTI tetap hidup salah satunya GEMA Pembebasan.

Penelitian ini menggunakan teori tentang gerakan sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun pasca pembubaran HTI, GEMA Pembebasan tetap berkoordinasi dengan HTI sebagai organisasi afiliasi. Gerakan GEMA Pembebasan di Kota Malang dilandasi adanya faktor kekecewaan terhadap sikap dan kebijakan politik dari negara. GEMA Pembebasan tetap mempertahankan gerakan dakwahnya dalam menegakkan syariat Islam. Meskipun mendapatkan resistensi gerakan karena memiliki ideologi yang sama dengan HTI, GEMA Pembebasan tetap mempertahankan eksistensi gerakan mereka. Dalam melakukan gerakannya, GEMA Pembebasan memanfaatkan organisasi sosial, pemimpin organisasi, jaringan gerakan, dan mobilisasi sumber daya.

Kata Kunci: HTI, GEMA Pembebasan, gerakan sosial, khilafah islamiyah

ABSTRACT

Syauqi Robbani. Sociology. Faculty of Social and Politics Science. Brawijaya University. Malang. Minor Thesis the Movement of GEMA Pembebasan on Post Dispersion Hizbut Tahrir Indonesia in Malang. Under Guidance of Slamet Thohari.

This research was about the movement of GEMA Pembebasan on post dispersion HTI. The purpose of this research was to eliminate and describe on GEMA Pembebasan movement in Malang. Although on 2017, the corporation of HTI has been yank out, but some student groups in the universities is the forerunner of HTI still exist, one of them is GEMA Pembebasan.

This research used social movement theory, using qualitative metode with descriptive approaching. The data collective technique used observation, interview, and documentation. The data analysis used Miles model and withdrawal conclusion.

The result of this study showed that although post dispersion of HTI, GEMA Pembebasan still coordinating with HTI as the affiliation organization. The movement of GEMA Pembebasan in Malang is based on the disappointment of political attitudes and policies of the country. GEMA Pembebasan continues to defend its propaganda in upholding syariat Islam. Despite gaining resistance from the movement because they have the same ideology as HTI, the GEMA Pembebasan still maintains the existence of their movement. in carrying out its movements, GEMA Pembebasan utilizes social organizations, organizational leaders, social networks, and resource mobilization.

Keyword: HTI, GEMA Pembebasan, social movement, khilafah islamiyah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak era pra-kemerdekaan sudah lahir Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan pergerakan lainnya. Pergerakan mahasiswa sejak dulu sudah tidak jauh dengan politik, meskipun pada pemerintahan Jepang yang lebih represif dalam pendidikan, melarang organisasi yang bersifat politik.

Pasca kemerdekaan setelah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar negara, banyak dari kelompok-kelompok mahasiswa tersebut yang berubah menjadi partai politik. Sebut saja Kelompok Studi Indonesia yang menjadi Partai Bangsa Indonesia dan Kelompok Studi Umum yang menjadi Perserikatan Nasional Indonesia. Selain itu, lahir organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai-partai politik pada masa itu. Ada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berafiliasi dengan Partai Masyumi, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia dengan Partai Komunis Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), dan organisasi mahasiswa lainnya. Peristiwa yang tidak kalah penting yaitu runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Pada tahun tersebut juga lahir organisasi ekstra kampus yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Demokrasi semakin kuat semenjak runtuhnya rezim orde baru. Ide demokrasi yang terbuka, dapat menerima ancaman yang menyerang demokrasi itu sendiri. Ancaman tersebut tetap dibiarkan selama tetap menjadi wacana. Jika menjadi gerakan untuk menghapus demokrasi itu sendiri maka perlu dibubarkan.



Termasuk juga gerakan Islam yang dianggap radikal dan fundamentalis. Pasca robohnya rezim orde baru di Indonesia mulai bermunculan gerakan-gerakan keagamaan yang dianggap radikal dan fundamentalis. Sebut saja Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Laskar Hizbullah, Brigade Taliban, Laskar Santri, Laskar Jundullah, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Gelombang wacana fundamentalisme dalam kurun waktu setelah rezim orde baru runtuh menjadikan Indonesia sebagai ladang pertarungan, baik pada level ide maupun aksi (Ro'uf, 2007, p. 157). Maka sebenarnya yang terjadi adalah dengan adanya sistem demokrasi sendirilah yang membuat kelompok-kelompok sosial di atas muncul.

Lahirnya kelompok-kelompok sosial saat ini diyakini sebagai indikasi dari pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Kehadiran mereka mempunyai tujuannya masing-masing untuk mewujudkan perubahan sosial yang ideal, yang lebih baik, dan memenuhi kepentingan masyarakat menurut mereka. Mereka membangun kesadaran dan bergerak bersama, melibatkan diri dalam persoalan dan menentukan arah dari kebijakan arah negara.

Mereka adalah kelompok masyarakat yang terintegrasi di dalam sebuah gerakan sosial, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dasar negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 sudah menjadi nilai yang tidak bisa diganggu gugat. Doktrin Khilafah Islamiyah diakui oleh para aktivis HTI sebagai antitesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final (Hilmy, 2011, p. 2).

HTI turut hadir sebagai gerakan di Kota Malang. Ide-ide HTI mulai bersemi pada tahun 1990. Di tahun tersebut, Badan Dakwah Masjid (BDM) Al-Hikmah IKIP Malang mengadakan Daurah Dirasah Islamiyah (DDI). Acara ini mengundang pemateri seperti, Muhammad Al-Khatath (Mantan Ketua HTI), Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI), dan beberapa tokoh lainnya. DDI juga diikuti oleh Sya'roni (Mantan Humas HTI Malang) sebagai perwakilan LDK Universitas Negeri Jember.

Mempunyai motif yang sama seperti beberapa gerakan yang telah dijelaskan sebelumnya, HTI di Kota Malang untuk menjalin kedekatan dengan mahasiswa. Pada tahun 1993 melalui Sya'roni, HTI berinteraksi sebagai gerakan melalui segmen kampus. Kampus menjadi segmen dakwah yang paling cepat perkembangannya dan memiliki tingkat intelektual tinggi. HTI di Malang pada masa ini masih berbentuk kelompok pemikiran bukan kelembagaan.

Beberapa tahun kemudian, basis-basis HTI di Malang mulai berkembang di dua kampus yaitu Universitas Brawijaya dan IKIP Malang (Arifan, 2010). Sifat represif rezim orde baru saat itu tidak memungkinkan untuk menyebarkan ide-idenya secara terbuka. Hal ini dilakukan karena konstelasi politik di bawah orde baru belum memungkinkan organisasi ini untuk muncul ke permukaan. Jika hal itu dilakukan, dapat terjadi ancaman intimidasi dan pembubaran dari penguasa, sehingga gerakan ini hanya melakukan aktivitas di bawah permukaan. Sehingga cara yang dilakukan dengan dakwah rumah ke rumah dan di masjid kampus setelah sholat berjamaah. Mereka memperkenalkan Hizbut Tahrir kepada orang-orang awam.

Setelah lengsernya Orde Baru pada tahun 1998 oleh gerakan reformasi terjadi perubahan iklim politik. Reformasi memberikan keterbukaan dan peluang bagi organisasi-organisasi yang terkungkung di bawah pemerintahan Orde Baru. Organisasi-organisasi tersebut mulai menampakkan statusnya.

Pada tahun 2002 Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan Konferensi Internasional di Istora Senayan yang di hadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional. Konferensi ini menjadi ajang resminya Hizbut dalam melakukan aktivitasnya di Indonesia. HTI memproklamasikan diri sebagai partai politik yang ber-ideologikan Islam (Sofiuddin, 2017, p. 9). Namun berbeda dengan organisasi politik secara umum, HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik dan mengisi parlemen. HTI menerjemahkan partai politik sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar.

Hal serupa diikuti oleh HTI di Kota Malang. Baru di tahun 2002 gerakan HTI di Malang disusun dengan kegiatan dan program yang jelas (Sumbulah, 2007). Mereka melakukan publikasi terkait keberadaan HTI. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak dikatakan sebagai gerakan bawah tanah yang mudah disusupi pihak lain. HTI di Kota Malang mulai berani menyampaikan ide-idenya secara terbuka, mempublikasi tulisan-tulisan mereka, dan melakukan aksi demonstrasi.

Pada tahun-tahun berikutnya mereka membentuk sayap pergerakan yang berbasis di kampus. Sering kali sayap pergerakan ini disebut sebagai organisasi

ekstra kampus sama seperti pergerakan mahasiswa lainnya. Organisasi yang berafiliasi secara politik dan ideologi dengan HTI ini salah satunya Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan. GEMA Pembebasan juga menyebut dirinya sebagai Organisasi Mahasiswa Eksternal Kampus (OMEK). Pembentukan organisasi seperti ini banyak dilakukan oleh organisasi maupun partai politik lain. Kehadiran mereka agar mampu meraih dan bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Secara konseptual organisasi seperti GEMA Pembebasan dapat mengurangi beban dan tugas-tugas satu sama lain. Meskipun terpisah, tetapi organisasi ini terlibat dalam koordinasi pengurus HTI.

Sebagai organisasi yang terstruktur, GEMA Pembebasan mempunyai Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Komisariat. Keberadaan organisasi ini telah tersebar di berbagai daerah terutama daerah yang memiliki banyak kampus. Kondisi ini juga diikuti oleh HTI di Kota Malang.

GEMA Pembebasan di Kota Malang mempunyai eksistensi untuk melakukan penyebaran ideologis, pencarian kader, bahkan politik praktis semata yang dapat dilihat dalam gerakan sosial. Adanya hubungan afiliasi HTI dan GEMA Pembebasan di Kota Malang, bermanfaat untuk membantu mensosialisasikan dan melaksanakan program kerja serta mobilisasi sumber daya dalam melakukan gerakan sosial. GEMA Pembebasan mengklaim memiliki beberapa komisariat yang tersebar di beberapa kampus di Kota Malang.



Sumber: GEMA Pembebasan

Gambar 1 Komisariat GEMA Pembebasan

Malang sendiri menjadi tempat eksotis bagi gerakan Islam. Mulai dari gerakan radikalisme dengan munculnya jaringan teroris Komando jihad Darul Islam (DI) terkait perampokan mobil yang mengangkut uang gaji pegawai IKIP Malang pada tahun 1979 (Terakota.id, 2018). Lalu ada aksi pengeboman di Gedung Seminari Alkitab Asia Tenggara dan Gereja Sasana Budaya Katolik di Malang pada tahun 1984 oleh jaringan Gerakan Pemuda Ka'bah. Lahir pula organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Terdapat gerakan mahasiswa Islam lain yang beroperasi di Malang seperti PMII, HMI, IMM dan organisasi lainnya. Gerakan-gerakan tersebut mampu bertahan dari gerakan Islam yang cukup mendominasi di Kota Malang seperti NU dan Muhammadiyah (Republika, 2015). Ini mencerminkan Malang sebagai tempat yang istimewa bagi perkembangan gerakan Islam. Malang juga menjadi daerah yang mempunyai banyak kampus dengan puluhan ribu mahasiswa. Kondisi ini cocok dengan HTI dan GEMA Pembebasan dalam menyampaikan ide-



ide mereka di lingkungan kampus. Kapolres Malang Kota, AKBP Hoirudin Hasibuan menyebut radikalisme di Malang banyak berkembang di dalam kampus (Merdeka.com Malang, 2017).

Namun, pada tahun 2017 keberadaan HTI mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam menegakkan *khilafah Islamiyah*. Dakwah menerapkan ideologi Hizbut Tahrir dengan mengganti Pancasila, mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk membubarkan ormas tersebut. Pada tahun 2017 melalui Kementerian Hukum dan Ham, HTI resmi dibubarkan dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pembubaran dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-31.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan SK Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum HTI. Pendirian badan hukum HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 2 Juli 2014 melalui web site Administrasi Hukum Umum (ahu.go.id).

Kebijakan pemerintah tersebut berpengaruh bagi HTI di Kota Malang. Kantor HTI Malang terlihat tutup dan papan nama HTI ikut dicabut. Pengurus-pengurus HTI Malang tidak terlihat di publik. Dampaknya juga berimbas pada GEMA Pembebasan. Melalui instruksi Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, kampus-kampus melakukan “bersih-bersih” segala kegiatan yang berhubungan HTI. Pengurus dan anggota mereka yang masih aktif berkuliah tidak dimunculkan namanya untuk menghindari pemanggilan pihak kampus.

Meskipun kantor mereka telah ditutup, mereka tetap beraktivitas di dalamnya. Pengurus mereka tetap melakukan tugas pokok dan fungsi mereka. Pengajian dan pembinaan terhadap anggota mereka tetap ada. GEMA Pembebasan lebih terbuka lagi, mereka tampil di media sosial terkait ide dan pemikiran mereka. Kegiatan di dalam kampus tidak bisa dilakukan, mereka melakukan kegiatan di luar kampus. Program kerja mereka tetap berjalan seperti biasa. Namun yang perlu dicatat, kegiatan-kegiatan ini sempat terhenti ketika isu pembubaran HTI mencuat di tahun 2017.

“Kalo di Malang tetap ya, aktivitas kita tetap. Kajian kita tetap, kemudian aksi-aksi kita tetap namun tidak memakai nama HTI. Termasuk juga terakhir kemarin kita mengadakan Tabligh Akbar yang mengikuti hampir seribuan. Ya ga ada yang berubah cuma ga ada nama HTI itu tadi.”

(Hasil wawancara HNA 27 Maret 2019 Pukul 15.27 WIB)

Bubaranya HTI oleh pemerintah merupakan pandangan dari sudut hukum, sehingga perlu dilihat pergerakannya di dalam masyarakat. Pada tahun 2017 badan hukum HTI telah dicabut oleh pemerintah melalui SK Kementerian Hukum dan Ham, tetapi kelompok GEMA Pembebasan yang ada di kampus-kampus Malang ini salah satu cikal bakal HTI tetap hidup. HTI memang sudah menjadi organisasi tanpa badan hukum. Namun para kader dan simpatisan berhak untuk berkumpul dan berserikat dengan organisasi lain terutama mahasiswa melalui GEMA Pembebasan. Kader dan simpatisan HTI bisa menganggap payung organisasi mereka telah dibubarkan.

Pasca pembubaran HTI, wacana yang muncul adalah tidak boleh ada gerakan yang bertentangan dengan Pancasila. Gerakan penegakan Khilafah Islamiyah seharusnya sudah tidak boleh dilakukan. Namun gerakan tersebut masih ada. Terdapat sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir antara dua organisasi ini untuk mempertahankan gerakan mereka. Ada bentuk komunikasi dan organisasi yang terstruktur untuk menjelaskan gerakan GEMA Pembebasan pasca pembubaran HTI. GEMA pembebasan melakukan pengorganisasian, mempertimbangkan langkah yang akan ditempuh, dan membangun daya tahan meskipun adanya pelarangan penegakan Khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat gerakan GEMA Pembebasan pasca pembubaran HTI di Kota Malang.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana gerakan dari GEMA Pembebasan pasca Pembubaran HTI di Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguraikan dan mendeskripsikan gerakan dari GEMA Pembebasan Kota Malang pasca pembubaran HTI dalam kerangka teoritik Gerakan Sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat penelitian dari segi akademis maupun praktis. Dalam segi akademis, memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi tentang gerakan sosial dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan pada penelitian lain dengan tema yang sama. Khususnya bagi

kajian gerakan mahasiswa. Dalam segi praktis, bagi masyarakat umum penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai dinamika gerakan GEMA Pembebasan Kota Malang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Banyak sekali penelitian yang dilakukan terhadap GEMA Pembebasan. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal.

Penelitian pertama dilakukan oleh Nanang Asmara yang berjudul terdapat karakteristik varian fundamentalisme Islam di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) (Asmara, 2012). Dengan pendekatan fenomenologi, subyek yang diambil adalah gerakan fundamentalisme di Islam di kalangan mahasiswa UMS pada tahun 2011.

Penelitian ini menemukan ada dua varian dan tiga kelompok gerakan fundamentalisme Islam di kalangan mahasiswa UMS pada tahun 2011. Varian tersebut yaitu fundamentalisme tradisional yaitu dari kelompok Salafi yang masuk di UMS pada tahun 2003. Lalu ada varian fundamentalisme modern yaitu dari kelompok KAMMI yang masuk di UMS pada tahun 1998 serta kelompok HTI yang berkembang pada tahun 2008. Tiga gerakan fundamentalisme Islam tersebut

masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. KAMMI dengan pola gerakan terbuka dan struktural lewat lembaga seperti Jama'ah Masjid Fadhlurrahman Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, sementara HTI lebih tertutup. Sedangkan Salafi menyusup lewat lembaga-lembaga Islam di UMS seperti Mentoring dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketiga gerakan fundamentalisme di kalangan mahasiswa UMS tersebut juga memiliki karakteristik fundamentalisme agama seperti totalisme, skripturalisme, modernisasi selektif, dan pentradisian namun dari masing-masing memiliki penekanan dan penafsiran yang berbeda. Gerakan fundamentalisme yang Islam yang ada di kalangan mahasiswa UMS dikoordinasikan oleh gerakan fundamentalisme yang ada di luar kampus. Gerakan ini berkembang dengan memanfaatkan kegiatan akademik untuk menyebarkan ideologi dengan berbagai macam pola dan metode gerakan. Penelitian ini mempunyai kontribusi untuk memberikan gambaran gerakan Islam di Perguruan Tinggi dengan melihat pada gerakan fundamentalisme Islam.

Penelitian kedua yang dilakukan Akhmad Haris Khariri tentang gerakan fundamentalis di perguruan tinggi untuk melihat pola gerakan dan strategi kaderisasi Hizbut Tahrir Indonesia di Kampus UIN Jakarta (Khariri, 2014). Kerangka teori yang digunakan yaitu fundamentalisme Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola gerakan dan strategi kaderisasi yang dikembangkan HTI dan mengetahui gejala fundamentalisme Islam di Kampus UIN Jakarta. Khariri menemukan pola gerakan dan strategi kaderisasi yang dikembangkan HTI di UIN Jakarta relatif intens dilakukan dan mengambil beberapa bentuk di antaranya

dengan memanfaatkan berbagai sarana baik yang dimiliki internal organisasi maupun sarana-sarana kampus seperti memanfaatkan media kampus Radio Dakwah dan Komunikasi RDK Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sarana ibadah Student Center, afiliasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, dan lain-lain. Sarana internal HTI mengembangkan sumber daya organisasi seperti pengembangan kelompok-kelompok studi seperti SRIKAYA, GEMA Pembebasan, Muslim Science Community, Lisma HTI, dan lain-lain. Berbagai sub sistem ini dimanfaatkan HTI untuk mengembangkan berbagai gagasannya melalui beberapa varian kegiatan-kegiatan seperti diskusi, seminar, aksi demonstrasi, pengajian, melakukan pendekatan pertemanan dan lain-lain. Selanjutnya strategi kaderisasi yang dikembangkan HTI yaitu dengan melakukan pembinaan intensif terhadap calon kadernya. Proses pembinaan tersebut ditempuh melalui berbagai tahapan seperti tahapan pembinaan dan pengkaderan (al-tathqif), tahapan berinteraksi dengan umat (marhalah al-taufiq ma'a al-umamah), dan tahapan pengambilan kekuasaan (istilam al-hukm). Terkait dengan fundamentalisme Islam, HTI dalam merespon gagasan-gagasan yang muncul di luar syariat Islam memiliki unsur politik yang kuat.

Sohim (2013) dalam penelitiannya melihat bagaimana dakwah yang diterapkan oleh GEMA Pembebasan Semarang dalam menyebarkan ideologinya di kalangan mahasiswa UNDIP. Penelitian ini berfokus pada aspek dakwah yang dilakukan GEMA Pembebasan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian ini melihat dakwah GEMA Pembebasan dengan menggunakan ideologi Islam sebagai sebuah ide atau paham yang hendak mewujudkan konsep syariat

dalam kehidupan sehari-hari dengan berorientasi pada penegakan dan pengamalan “Islam yang murni” dalam negara khilafah. Tujuannya untuk menghendaki sebuah perubahan fundamental tanpa menghalalkan segala cara yang dapat mengakibatkan pada aksi kekerasan. Dalam menyebarkan ideologi Islam, GEMA Pembebasan Semarang memiliki agenda dakwah dalam menyebarkan ideologinya tersebut melalui tiga cara, yaitu membangun jaringan Pembebasan, Pembentukan Kesadaran dan Opini Pembebasan dengan cara membuat dan menyebarkan Buletin GEMA Pembebasan, dan melalui Pembinaan Mahasiswa Kader Pembebasan dengan cara mengadakan Training Pembebasan (TP) dan membentuk Khalaqah Kader Pembebasan.

Maulia (2017) melakukan penelitian untuk melihat pemahaman dan menjelaskan sikap organisasi GEMA Pembebasan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap organisasi GEMA Pembebasan terhadap Pancasila di Bandung dapat dikategorikan netral. Dalam artian tidak berada di pihak yang secara ekstrim menolak keberadaan Pancasila. Tetapi GEMA Pembebasan juga tidak berada di pihak yang secara tegas mendukung Pancasila. Sikap GEMA Pembebasan terhadap Pancasila dalam penelitiannya dapat dikategorikan tidak mendukung.

Penelitian terakhir yang dijadikan acuan sebagai temuan sebelumnya dilakukan oleh Chaidherra (2015) yang melihat GEMA Pembebasan di Kota Makassar dari tahun 2002-2013. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan tahapans heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasilnya menunjukkan bahwa

GEMA Pembebasan merupakan salah satu organisasi sayap dari Hizbut Tahrir Indonesia yang bergerak di bidang politik. GEMA Pembebasan didirikan untuk membantu Hizbut Tahrir Indonesia yang menyebarkan ide dan pemikirannya di kalangan mahasiswa sebagai usaha mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia. Di Kota Makassar semenjak tahun 2002 sampai 2013, GEMA Pembebasan mampu terus menunjukkan eksistensinya dengan membentuk jaringan organisasi di kampus-kampus besar seperti Universitas Hasanudin, Universitas Islam Negeri Alaudin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Meskipun GEMA Pembebasan belum memberikan dampak yang cukup serius terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah, namun mereka menawarkan opsi baru kepada pergerakan mahasiswa di seluruh Indonesia dalam menjawab segala persoalan yang terjadi dalam bangsa dan negara.

Dari beberapa penelitian terdahulu memberikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis serta memberikan bahan kajian. Persamaan yang muncul yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami GEMA Pembebasan dalam berbagai fokus dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu juga memberikan sumbangsih dalam memahami GEMA Pembebasan seperti karakteristik varian fundamentalisme Islam di perguruan tinggi, gerakan dan strategi kaderisasi Hizbut Tahrir Indonesia di perguruan tinggi, dakwah Islam GEMA Pembebasan, sejarah GEMA Pembebasan, dan pandangan GEMA Pembebasan terhadap Pancasila. Semua penelitian dilakukan di perguruan tinggi dan kota yang berbeda.

Belum ada penelitian yang membahas gerakan dari GEMA Pembebasan khususnya pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Malang menjadi tempat yang subur bagi pertumbuhan gerakan Islam gerakan Islam mainstream hingga radikal dan fundamentalis. Malang dengan banyak kampus juga menjadi tempat penyebaran ide-ide gerakan Islam. GEMA Pembebasan dan HTI ikut mengambil bagian untuk ikut menyebarkan ide-ide mereka. Gerakan-gerakan mereka mampu bertahan dari gerakan Islam yang cukup mendominasi di Kota Malang seperti NU dan Muhammadiyah Oleh sebab itu peneliti ingin melihat GEMA Pembebasan pasca pembubaran HTI melalui kerangka teoritik gerakan sosial di Kota Malang.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Gerakan Sosial

Para ahli dalam melihat gerakan sosial memiliki pendekatan yang berbeda-beda sehingga hal ini menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Menurut Macionis dalam Sukmana (2016, p. 4) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Locher (2002, p. 231) berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial. Elizabeth (Nottingham, 1985, p. 145) semua organisasi sosial dimaksudkan untuk membentuk tingkah laku manusia dengan pola yang ditentukan, baik pola yang ditetapkan oleh doktrin agama, ajaran etik, maupun oleh filsafat politik. Oleh karena itu gerakan GEMA Pembebasan merupakan organisasi keagamaan dimaksudkan untuk

membentuk tingkah laku manusia sesuai dengan pola yang ditentukan oleh doktrin agama.

Beberapa sosiolog melihat gerakan sosial lebih sebagai bentuk dari tindakan kolektif dari pada perilaku kolektif (Sukmana, 2016, p. 2). Perilaku kolektif dapat berbentuk kerumunan, kerusuhan, dan pembangkangan. Sedangkan tindakan kolektif bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok. Perilaku kolektif dan gerakan sosial dapat dilihat dari tiga aspek perbedaan, yaitu pengorganisasian, pertimbangan, dan daya tahan (Locher, 2002). Gerakan sosial merupakan aktivitas yang terorganisir dari aspek pengorganisasian. Dari aspek pertimbangan, gerakan sosial secara insentif sengaja dimunculkan dan partisipan mempertimbangkan untuk ikut atau tidak terlibat dalam suatu gerakan. Sedangkan aspek daya tahan, gerakan sosial pada umumnya bertahan dalam waktu yang lama.

Menurut Macionis dalam Sukmana (2016, p. 26) terdapat empat tahapan dalam proses gerakan sosial. Tahap pertama, kedua, dan ketiga untuk menggambarkan GEMA Pembebasan di Kota Malang. Tahap keempat untuk membahas gerakan GEMA Pembebasan pasca pembubarahn HTI. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap Kemunculan

Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya sedang tidak baik-baik saja. Maka muncullah tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui gerakan sosial.

2. Tahap Penggabungan

Setelah tahap kemunculan, suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi yang terdapat seperti hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam gerakan sosial.

3. Tahap Birokratisasi

Dalam tahap ini gerakan sosial menjadi sebuah kekuatan politik. Agar menjadi kekuatan politik, suatu gerakan sosial harus memiliki sifat-sifat birokrasi agar menjadi mapan dan ketergantungan dengan pemimpin akar berkurang karena terbantu dengan adanya anggota-anggota yang dapat bekerja dengan baik. Jika suatu gerakan sosial tidak mapan akan mudah menghilang.

4. Tahap penurunan/Kemunduran

Pada tahap ini, gerakan sosial kehilangan pengaruhnya. Menurut Macionis dalam Sukmana (2016, p. 27) terdapat lima alasan mengapa suatu gerakan sosial mengalami kemunduran:

1. Aktivitas suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena dianggap telah berhasil melakukan kegiatannya dan mencapai tujuannya;
2. Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi;
3. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan;

4. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan terutama dari pihak eksternal;
5. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut ke dalam pengarus utamaan. Beberapa gerakan diterima ke dalam bagian dari suatu sistem sehingga tidak ada tantangan atas *status quo*.

Setiap gerakan sosial selalu ada pihak yang mendukung, namun juga ada yang menentang atau menolak. Hal ini terjadi karena gerakan sosial menginginkan adanya suatu perubahan atau untuk menjaga sesuatu agar tidak berubah. Maka ada orang atau pihak yang tidak menginginkan gerakan sosial tersebut berjalan. Penolakan atau perlawanan terhadap suatu gerakan sosial dilakukan oleh pihak yang diuntungkan bila gerakan sosial tersebut mengalami kegagalan.

Terdapat masalah-masalah dalam organisasi keagamaan. Agar berhasil dalam mempengaruhi masyarakat, organisasi tersebut harus berhasil dalam dua sektor (Nottingham, 1985). Di satu pihak organisasi tersebut harus menertibkan kebiasaan-kebiasaan para anggotanya sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Di lain pihak, jika organisasi tersebut ingin mempengaruhi masyarakat yang lebih luas, mereka harus mengembangkan organisasi dan memperbesar pengaruhnya yang potensial dengan cara memasukkan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan di luar lingkungan mereka. Keberhasilan pada salah satu sektor aja biasanya menimbulkan bahaya pada sektor lainnya.

Untuk melukiskan situasi dilema tersebut melibatkan dua asumsi penting (Nottingham, 1985). Asumsi pertama berhubungan dengan masalah mempertahankan disiplin kelompok. Asumsinya bahwa disiplin etik keagamaan yang ketat pasti akan bertentangan dengan tingkah laku sebagian besar kelompok. Setiap individu mempunyai kemampuan dan perhatian yang tidak sama dalam bidang keagamaan. Asumsi yang kedua yang berhubungan dengan masalah mempengaruhi tingkah laku manusia sesuai dengan organisasi keagamaan itu tidak sejalan dengan tujuan-tujuan konvensional masyarakat dan lembaga-lembaganya. Dengan kata lain terdapat konflik mendasar antara kepentingan keagamaan dengan masyarakat duniawi.

Kelompok keagamaan dapat menghadapi situasi seperti ini dengan dua cara. Pertama mereka dapat menyelamatkan anggota-anggotanya dari dunia yang jahat dengan menarik mereka sejauh mungkin. Kedua, sebagai alternatif, mereka dapat melibatkan diri secara aktif dalam pertempuran melawan dunia itu dan berusaha mengubahnya. Untuk kelompok yang menarik diri biasanya tetap kecil dan mempunyai pengaruh yang agak sedikit pada masyarakat yang lebih luas. Tetapi jika ada kelompok propagandis militan dapat mempengaruhi dunia luar hanya jika memperluas keanggotaan mereka. Akan tetapi jika perluasan ini ingin mencapai tujuan kelompok, maka ia harus memasukkan paling tidak beberapa anggota yang berkuasa dan berwibawa di dalam masyarakat yang ingin dituju.

GEMA Pembebasan merupakan organisasi keagamaan yang melakukan pengorganisasian, pertimbangan, dan mempunyai daya tahan untuk

mencapai perubahan sosial. Tujuan tersebut untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya di kalangan mahasiswa di Kota Malang. Untuk mencapai tujuannya, GEMA Pembebasan melalui tahap-tahap dari kemunculan hingga kemunduran. Kemunduran ini disebabkan oleh resistensi dari pihak yang tidak menginginkan tujuan GEMA Pembebasan berhasil dari pemerintah maupun masyarakat.

Teori Mobilisasi atau *Resource Mobilization Theory* (RMT) merupakan kerangka teoritik yang cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial. Banyak para ahli teori yang memberikan pandangan mereka tentang RMT. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Anthony Oberschall (Locher, 2002, p. 258). Oberschall mengkritik *Mass Society Theory* yang pada waktu itu merupakan perspektif yang sangat dominan dalam mengkaji gerakan sosial. Menurut Cohen (Singh, 2010, p. 135), teoretisi mobilisasi sumber daya mengawali tesis mereka dengan penolakan atas perhatian terhadap peran perasaan dan ketidakpuasan, serta penggunaan kategori psikologi dalam memahami gerakan sosial baru.

RMT memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan (Sukmana, 2016, p. 154). Perhatiannya lebih banyak mengarah pada faktor-faktor ekonomi dan politik. Asumsi yang dibangun dari teori ini bahwa dalam suatu masyarakat di mana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Asumsi dasar paradigma yang lain dalam RMT adalah

gerakan kontemporer mensyaratkan sebetulnya komunikasi dan organisasi yang canggih.

Klandermans dalam Sukmana (2016) menyatakan bahwa RMT menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural, seperti ketersediaan sumber daya untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Partisipasi tersebut merupakan hasil proses-proses keputusan rasional di mana orang melakukan pertimbangan untung dan rugi. Upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial merupakan esensi dari RMT.

Pada konteks gerakan GEMA Pembebasan, terjadinya mobilisasi sumber daya digunakan untuk melihat proses-proses sosial yang muncul dan berhasilnya gerakan mereka pasca pembubaran HTI. Ini disebabkan karena adanya ketidakpuasan GEMA Pembebasan atas munculnya wacana pelarangan Khilafah Islamiyah yang dilakukan oleh negara. Untuk itu RMT digunakan untuk melihat faktor-faktor struktural yang digunakan oleh GEMA Pembebasan. Selain itu untuk melihat basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam gerakan GEMA Pembebasan.

Sukmana (2016, p. 160) merumuskan faktor-faktor dari para teoritis RMT yang determinan dalam suatu gerakan sosial, yaitu

1. Organisasi Gerakan Sosial

Kata organisasi mengandung tiga makna (Sukmana, 2016, p. 162), pertama organisasi diartikan sebagai sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kedua, organisasi diartikan suatu kelompok mempunyai diferensiasi peranan, sementara yang lainnya sebagai pengikut. Ketiga, Organisasi adalah sekelompok orang yang sepakat untuk mematuhi seperangkat norma.

Menurut Oberschall (Locher, 2002, p. 260), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan. Sehingga setiap organisasi gerakan sosial harus mampu mengelola sumber-sumber yang tersedia dengan baik

2. Pemimpin dan Kepemimpinan

Pemimpin gerakan didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis yang menginspirasi dan mengorganisasi orang untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial. Pemimpin dalam suatu organisasi gerakan sosial memiliki risiko dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan para anggotanya. Namun, jika gerakan sosial berhasil, mereka akan menerima keuntungan yang paling besar. Para pemimpin sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun strategi, membingkai tuntutan-tuntutan, dan mempengaruhi hasil (David A Snow, 2004, p. 171).

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok melalui pencapaian tujuan (Stephen P Robbins, 2012, p. 257). Dalam kepemimpinan melibatkan upaya pemimpin untuk mempengaruhi perilaku satu atau beberapa orang lainnya. Kepemimpinan meliputi berbagai tindakan dari anggota kelompok dalam *setting* tujuan kelompok, mengarahkan kelompok kepada tujuan, meningkatkan kualitas interaksi antar anggota, membangun kohesitas kelompok, dan membuat ketersediaan sumber daya bagi kelompok.

3. Sumber Daya dan Mobilisasi Sumber Daya

Menurut Edward dan McCarthy terdapat lima tipe sumber daya dalam konteks gerakan sosial (David A Snow, 2004, pp. 178-179), yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya organisasi sosial, sumber daya manusia, dan sumber daya material. Tipe-tipe sumber daya tersebut bisa diakses dengan empat mekanisme, yaitu pengumpulan, produksi diri, pengambilan, dan perlindungan. Hal inilah yang menjadi faktor determinan dalam sumber daya dan mobilisasinya.

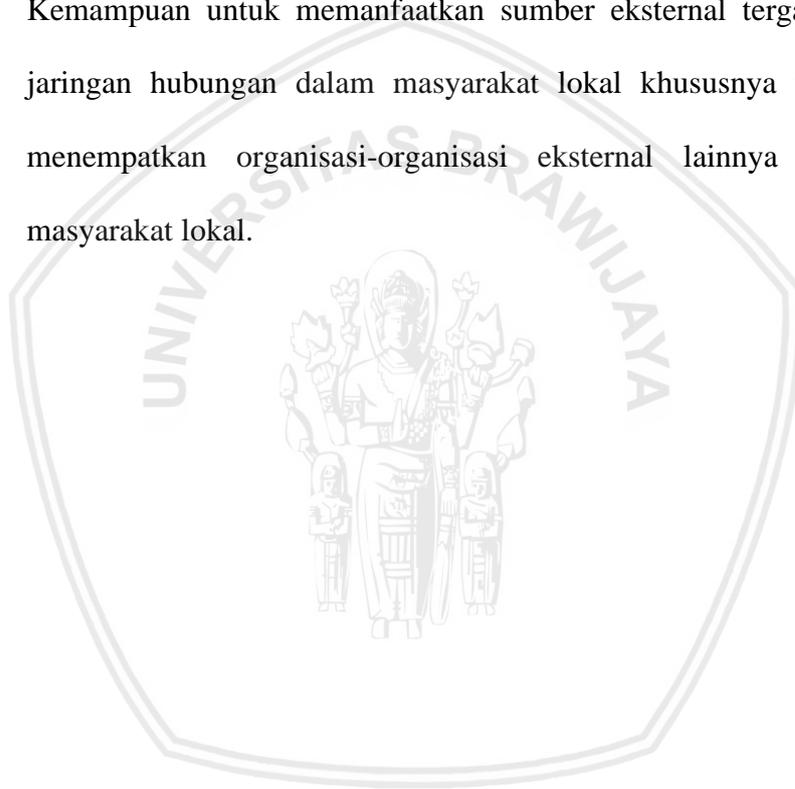
4. Jaringan dan Partisipasi

Jaringan dan partisipasi juga menjadi faktor determinan dalam teori ini. Terdapat pengaruh dari jaringan sosial terhadap partisipasi individu di dalam gerakan sosial. Partisipasi individu dan kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam gerakan sosial. Partisipasi tersebut dapat berbentuk kolektivitas dari orang-orang yang terlibat dalam upaya menciptakan atau menolak perubahan sosial. Keberhasilan suatu

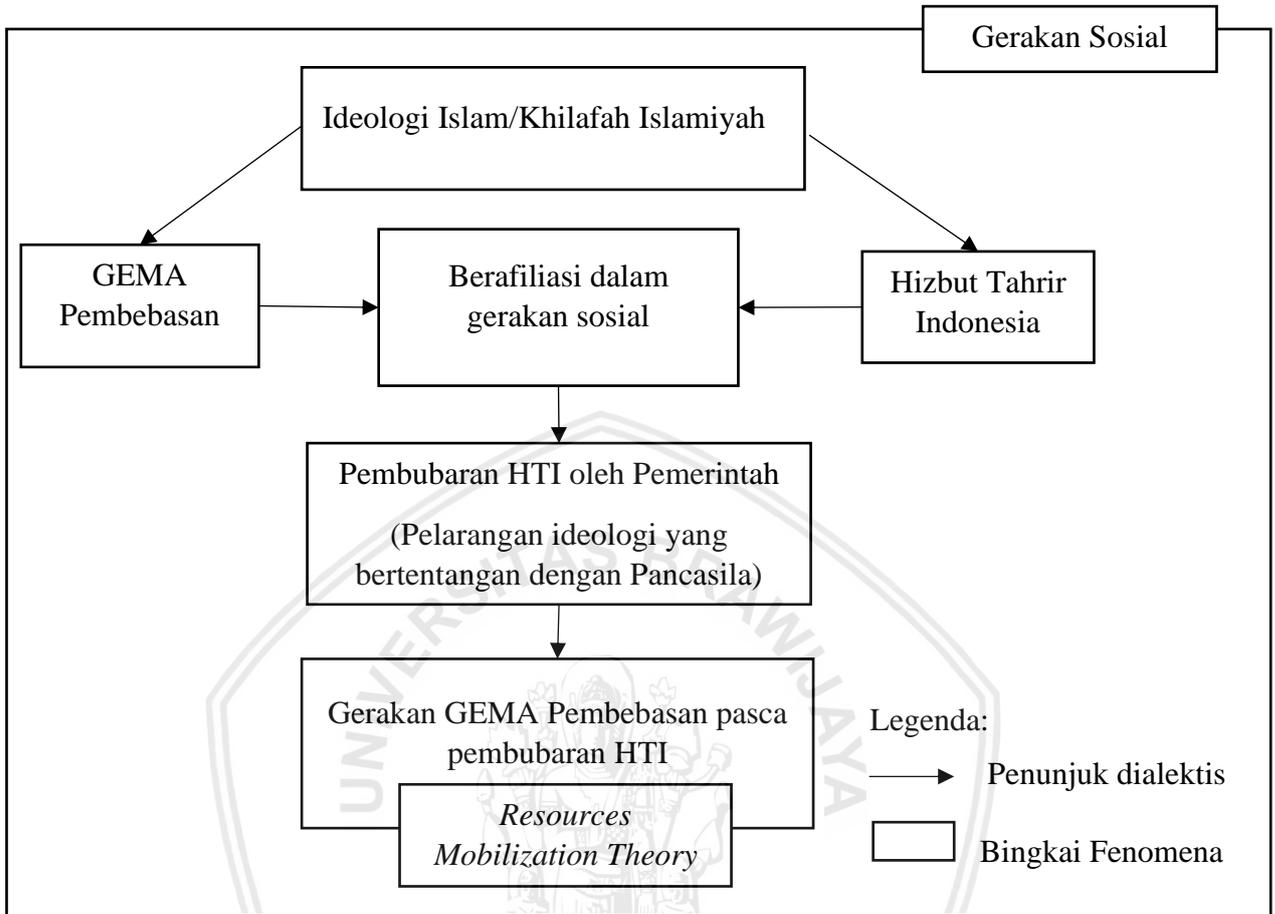
organisasi gerakan sosial berkaitan dengan sejauh mana mobilisasi yang dilakukan individu maupun kelompok dalam mendukung gerakan.

5. Peluang dan Kapasitas Masyarakat

Sumber daya sering kali berasal dari sumber-sumber eksternal atas masyarakat lokal, baik bersifat privat, non-profit, atau dana-dana publik untuk mendukung aktivitas-aktivitas dan program-program khusus. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber eksternal tergantung atas jaringan hubungan dalam masyarakat lokal khususnya yang dapat menempatkan organisasi-organisasi eksternal lainnya ke dalam masyarakat lokal.



2.3. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti

Gambar 2 Kerangka Berpikir

Doktrin Khilafah islamiyah diakui oleh para aktivis HTI sebagai antitesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final. Mempunyai motif yang sama seperti beberapa gerakan organisasi politik lainnya, HTI menjalin kedekatan dengan mahasiswa bahkan sejak organisasi politik ini masuk ke Indonesia pada zaman Orde Baru. Organisasi yang berafiliasi secara politik dan ideologi dengan HTI ini salah satunya Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan. GEMA Pembebasan juga menyebut dirinya sebagai Organisasi Mahasiswa Eksternal Kampus (OMEK).

Pembentukan organisasi seperti ini banyak dilakukan oleh organisasi maupun partai politik lain. Kehadiran mereka agar mampu meraih dan bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Secara konseptual organisasi seperti GEMA Pembebasan dapat mengurangi beban dan tugas-tugas satu sama lain. Meskipun terpisah, tetapi organisasi ini terlibat dalam koordinasi pengurus HTI.

Gerakan penegakan khilafah Islamiyah telah berlangsung sejak HTI berdiri pada tahun 2002 dan GEMA Pembebasan pada tahun 2004. Namun pada tahun 2017, terjadi perselisihan antara pemerintah dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Perselisihan yang terjadi sejak 2017 silam dimulai saat pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 dengan beberapa alasan. Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah mengeluarkan AHU.30.AH.01.08 tentang Status Badan Hukum HTI. Dengan beberapa alasan, HTI dalam artian hukum tidak mempunyai badan hukum lagi atau dalam artian lain dibubarkan.

HTI memang sudah menjadi organisasi tanpa badan hukum, namun para kader dan simpatisan berhak untuk berkumpul dan berserikat dengan organisasi lain, salah satunya GEMA Pembebasan. Pembubaran HTI bukan semata untuk membubarkan organisasinya, tetapi mencegah penyebaran ajaran Khilafah Islamiyah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Bukan hanya HTI yang menjadi perhatian, semua lini organisasi yang berkaitan dengan HTI juga ikut terkena dampaknya. Hal ini menjadi wajar karena organisasi yang berkaitan dengan HTI mempunyai tujuan gerakan yang sama termasuk gerakan GEMA Pembebasan di Kota Malang. Kader dan simpatisan HTI bisa menganggap payung organisasi mereka telah dibubarkan, tetapi struktur emosional yang mereka bangun tidak bisa

hilang begitu saja. Dalam penelitian ini untuk memahami fenomena dengan kerangka teoritik gerakan sosial. Lalu, melihat Gerakan GEMA Pembebasan dengan melalui mobilisasi sumber daya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010, p. 1). Temuan pada jenis penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang diterapkan dalam penelitian ini (Moleong, 2008). Tujuan penelitian kualitatif deskriptif ialah mencakup berbagai informasi yang terkait dengan fenomena yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, serta lokasi penelitian (Creswell, 2015).

Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif untuk melihat dan menjelaskan gerakan GEMA Pembebasan secara umum dan pasca pembubaran HTI secara khusus. Melalui anggota GEMA Pembebasan dan anggota HTI, peneliti mengambil informasi tentang kejadian yang ada di lapangan. Sebelum itu peneliti akan menggambarkan secara umum tentang GEMA Pembebasan dan HTI yang terlibat dalam gerakan ini.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2010, p. 1), fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam satu topik permasalahan yang sedang diteliti dan sekaligus menjadi batasan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini mengarahkan fokusnya pada latar belakang pembubaran HTI pada tahun 2017 hingga sekarang dan gerakan GEMA Pembebasan Kota Malang pasca dibubarkannya HTI. Fokus ini dipilih berdasarkan fenomena pembubaran HTI yang menunjukkan tanggapan gerakan dari GEMA Pembebasan sebagai organisasi afiliasi HTI.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang karena beberapa hal. Pertama GEMA Pembebasan terdapat di berbagai kota di Indonesia termasuk Kota Malang. Kedua belum ada penelitian yang membahas gerakan GEMA Pembebasan pasca pembubaran HTI di Kota Malang. Ketiga, banyak organisasi Islam yang lahir seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) maupun yang beroperasi di Kota Malang seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan lain sebagainya. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Malang menjadi

tempat yang dapat mengembangkan organisasi Islam itu sendiri. Terakhir karena alasan akademis, Malang sebagai Kota Pelajar yang memiliki banyak kampus sesuai dengan arah gerakan GEMA Pembebasan.

3.4. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2008, p. 85) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* merupakan pendekatan dengan teknik *non-probability sampling*. Menurut Sugiyono (Memahami Penelitian Kualitatif, 2010, p. 53) *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini dipilih karena dianggap lebih mudah dalam pengoperasiannya, terlebih dengan adanya pembuatan kategori informan tertentu yang dilakukan oleh peneliti. Informan yang dipilih merupakan mereka yang mengetahui dan memahami tentang dinamika dan perkembangan yang terjadi di GEMA Pembebasan Kota Malang. Merujuk pada hal tersebut, informan yang dibutuhkan adalah mereka yang terlibat secara langsung atau tidak, mengetahui ataupun memahami kondisi GEMA Pembebasan. Adapun informan tersebut antara lain anggota, kader atau simpatisan, serta informan yang terlibat dengan aktivitas GEMA Pembebasan Malang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperkuat hasil dan analisa penelitian. Operasional dari sumber data

menggunakan data primer sebagai data utama, lalu didukung menggunakan data sekunder.

3.5.1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan bersama partisipan yang dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia (Raco, 2010, p. 112). Pengumpulan data melalui observasi bertujuan untuk menangkap fenomena lapangan sedetail dan senatural mungkin. Dalam penelitian ini, jenis observasi yang akan digunakan peneliti adalah pengamatan tidak terlibat. Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan mulai dari persiapan dan perencanaan gerakan, mempersiapkan perlengkapan gerakan, ikut ambil bagian dalam gerakan, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan aktivitas GEMA Pembebasan Kota Malang.

3.5.2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realita (Raco, 2010, p. 116). Dalam penelitian ini wawancara akan diarahkan pada informan-informan tertentu yang memenuhi kategori yang telah ditetapkan peneliti. Setidaknya terdapat beberapa poin pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti di antaranya (1) latar belakang informan, (2) pengetahuan tentang GEMA Pembebasan, (3) kegiatan yang pernah atau sedang dilakukan bersama GEMA Pembebasan, (4) bentuk-bentuk gerakan

GEMA Pembebasan. Kategori-kategori tersebut kemudian akan diturunkan dalam item pertanyaan panduan awal wawancara. Kategori yang ada tidak bersifat mengikat sepenuhnya namun dapat berkembang seiring dengan proses penelitian dan wawancara berlangsung.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, catatan, kebijakan, dan peraturan (Sugiyono, 2008, p. 240). Dalam mendukung dua sumber primer, sumber-sumber dokumentasi dalam bentuk dokumen akan memperkuat analisis dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang akan menjadi dasar penelitian di antaranya adalah dokumen tertulis seperti surat menyurat, notulensi rapat, perizinan, keputusan pengurus GEMA Pembebasan, peraturan tertulis GEMA Pembebasan, serta dokumentasi seperti foto dan video kegiatan GEMA Pembebasan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif diawali dengan menyiapkan data dan mengorganisasikan data dan mengorganisasikan data untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses *coding* dan peringkasan kode, lalu menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan (Creswell, 2015). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Dalam melakukan teknik analisis deskriptif, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2010) terdapat tiga tahap, yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi Data sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Oleh karena itu reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian di Kota Malang. Pada proses ini peneliti memilah-milah kembali hasil dari data yang dikumpulkan sehingga menghasilkan data yang benar-benar peneliti perlukan. Data tersebut berupa rekaman wawancara, transkrip wawancara, tulisan, catatan lapangan, dokumentasi foto, dan video terkait GEMA Pembebasan serta HTI. Untuk penelitian ini mengambil data terkait gerakan sosial meskipun terdapat pilihan lain seperti konflik, budaya organisasi, dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian ini dilakukan. Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus GEMA Pembebasan pasca pembubaran HTI secara praktis. Dari data lapangan yang telah didapatkan, lalu diolah sehingga hasilnya menjadi data yang ringkas. Data-data tersebut kemudian diinterpretasikan oleh peneliti di dalam tulisan ini. Data yang sudah diolah tersebut akan dikaitkan dengan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori gerakan sosial.

3. Penarikan Kesimpulan.

Dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap gerakan GEMA Pembebasan di lapangan dengan menyusun pola-pola

pengarahan dan sebab-akibat. Ini sebagai acuan dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data yang telah di dapat dan melewati tahap sebelumnya akan diungkapkan maknanya karena bersifat tentatif, kabur, kaku, dan meragukan. Oleh karena itu peneliti harus menarik kesimpulan agar narasi yang dihasilkan tidak keluar dari batas penelitian yang ditentukan. Pada akhirnya penarikan kesimpulan yang sudah dilakukan akan menjawab gerakan GEMA Pembebasan pasca pembubaran HTI.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Hizbut Tahrir Indonesia dan GEMA Pembebasan

Kedekatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mahasiswa sudah terjalin sejak organisasi politik ini masuk ke Indonesia. Sebagai sebuah gerakan pemikiran, HTI membangun basis melalui dakwah, diskusi, dan seminar di kampus. Cara ini telah dilakukan sejak Hizbut Tahrir datang ke IPB pada 1983 lewat Abdurrahman Al-Baghdadi (Kresna, 2017). Cara HTI mendekati para pengikutnya di kampus dilakukan lewat dua metode. Pertama secara langsung melakukan kegiatan HTI cabang kampus, dan kedua membangun afiliasi dengan menempatkan kader mereka pada jabatan strategis di organisasi kampus. Cara secara langsung misalnya dengan membuat seminar dan pelatihan. Cara kedua dilakukan seperti menyisipkan tema kegiatan beserta para pembicara ke organisasi kampus yang berafiliasi dengan HTI.

HTI memiliki HTI cabang kampus dan Muslimah HTI yang strukturnya terpisah dari kepengurusan HTI. Selain dua organisasi dalam komando HTI, ada pula Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan yang merupakan organisasi independen yang berafiliasi secara politik dan ideologi dengan HTI.

4.1.1. Hizbut Tahrir Indonesia

Lahirnya Gerakan Mahasiswa Pembebasan di Indonesia tidak terlepas dari peran Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik yang berideologi Islam (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009, p. 67). Tujuannya membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran,

sistem hukum, dan negara Islam dengan menerapkan syariah Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia.

Awalnya HT berdiri pada tahun 1953 M/1372 H di al-Quds atau Baitul Maqdis, Palestina (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009, p. 71) kemudian pusat gerakannya pindah ke Yordania. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyudin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh, seorang Mahkamah Banding, serta seorang politisi di Palestina.

Sebagai organisasi politik berskala internasional, HT memiliki cita-cita besar untuk melangsungkan kehidupan dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menegakkan nilai-nilai Islam di masyarakat, HT berusaha melakukannya melalui negara yang menekankan pada *daulah Islamiyah*/negara Islam atau *daulah khilafah*/negara khilafah. Negara yang dibentuk dipimpin oleh seorang *khalifah* dan dipilih secara demokratis oleh rakyat. Khalifah terpilih menjalankan pemerintahan berdasarkan kitab al-Qur'an dan sunnah Rasul di agama Islam. Kejayaan umat Islam pada masa lalu dijadikan rujukan karena dianggap sebagai solusi yang mencerahkan dan mencerdaskan (Kennedi, 2012, p. 3).

Berdirinya Hizbut Tahrir berskala internasional melebarkan sayap ke berbagai negara termasuk Indonesia. Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1982-1983 di Indonesia dengan membawa misi mengembalikan Islam ke dalam sistem khilafah secara Internasional. Dilihat dari segi kausalitas, lahirnya Hizbut Tahrir di Indonesia karena adanya Hizbut Tahrir di luar negeri, seperti

Hizbut Tahrir Malaysia, Hizbut Tahrir Australia, Hizbut Tahrir Inggris dan lainnya (Sofiuddin, 2017, p. 3).

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1983 dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi (Shobron, 2014). Ia seorang mubalig/juru dakwah sekaligus aktivis Hizbut Tahrir di Lebanon yang migrasi ke Australia pada awal tahun 1960-an karena menghindari persekusi di negaranya. Abdurrahman bertemu dengan Mama Abdullah bin Nuh seorang ulama dan pimpinan pesantren al-Ghazali di Bogor, Jawa Barat. Ia juga seorang pengajar di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Abdullah meminta pada Abdurrahman untuk membantu mengembangkan pesantrennya dan sejak itu mulai menyebar ide-ide Hizbut Tahrir di Indonesia.

Tidak hanya di pesantren milik Abdullah, Abdurrahman mulai berkeliling untuk berdakwah dan mulai masuk ke dunia kampus. Dimulai dari Masjid Al-Ghifari Institut Pertanian Bogor sebagai tempat menyalurkan ide-ide Hizbut Tahrir. Tokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor. Upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat respon baik dari *civitas* akademik Institut Pertanian Bogor (IPB). Salah satu pimpinan pusat HTI adalah alumnus dan dosen IPB yang bernama Muhammad al-Khattat (Amal, 2004, p. 41). Kemudian menyebar ke kampus-kampus umum di wilayah Jakarta dan Jawa melalui jaringan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus. Mahasiswa yang telah menerima ide Hizbut Tahrir memiliki tugas untuk meneruskannya kepada aktivis mahasiswa lain yang aktif di LDK. LDK yang berisi sebagian mahasiswa yang telah menerima ide Hizbut Tahrir, secara

kelembagaan berkembang menjadi forum silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada tahun 1986. Salah satu pendiri forum ini adalah Muhammad Ismail Yusanto dari Universitas Gadjah Mada dan forum ini menjadi cikal bakal perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia (Shobron, 2014).

Tahun 1994 HTI melakukan aktivitasnya ke publik meski belum memakai nama aslinya. HTI menciptakan organisasi-organisasi dan aktivitas-aktivitas yang terselubung seperti seminar, *halaqah* mingguan, penerbitan buku, majalah, dan pamflet (Abdul Qohar, 2017, p. 372). Semua aktivitas HTI masih terbatas pada taraf diseminasi ide dan rekrutmen, tanpa sampai bergerak lebih jauh ke aksi mobilisasi di jalanan seperti yang HTI lakukan beberapa tahun terakhir karena berada di zaman Orde Baru. Setelah lengsernya Orde Baru pada tahun 1998 oleh gerakan reformasi terjadi perubahan iklim politik. Reformasi memberikan keterbukaan dan peluang bagi organisasi-organisasi yang terkungkung di bawah pemerintahan Orde Baru. Organisasi-organisasi tersebut mulai menampakkan statusnya termasuk Hizbut Tahrir.



Sumber : hizb-indonesia.info

Gambar 3 Lambang Hizbut Tahrir

Pada tahun 2002 Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan Konferensi Internasional di Istora Senayan yang di hadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional. Konferensi ini menjadi ajang resminya Hizbut dalam melakukan aktivitasnya di Indonesia. HTI memproklamasikan diri sebagai partai politik yang ber-ideologikan Islam (Sofiuddin, 2017, p. 9). Pada tahun 2006 HTI mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri). Pada tahun 2014 diakui memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemnkumham). Dalam konteks Indonesia Hizbut Tahrir dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hizbut Tahrir mampu mengembangkan operasinya di Indonesia dengan mendirikan 33 pengurus tingkat wilayah dan 300 tingkat daerah.



Sumber: diolah oleh peneliti

Gambar 4 Bagian dari Organisasi HTI

Hizbut Tahrir Indonesia dibangun atas dasar kemandirian pendanaan untuk operasional diperoleh dari simpatisan dan tidak menerima bantuan dari pemerintah. Bahkan mereka secara tegas dan menolak dan mengharamkan penerimaan bantuan dari pemerintah. HTI melakukan penelitian secara

seksama untuk menjaga kemandirian dan independensi dari setiap sumbangan yang didapat (Abidin, 2010, p. 40).

Hizbut Tahrir maupun Hizbut Tahrir dari awal dirancang sebagai organisasi politik. Namun berbeda dengan organisasi politik secara umum, HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik dan mengisi parlemen. HTI menerjemahkan partai politik sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Menurut HTI dalam situasi sekarang hal ini dilakukan banyak partai Islam yang berdiri namun membingungkan umat Islam sendiri. Alasan ini yang menyebabkan HTI tidak mengikuti langkah partai politik Islam yang untuk ikut dalam pemilu dan menempatkan anggota legislatif. Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat HTI akan menjadi partai politik seperti di Yordania, Lebanon, dan negara lainnya (Abidin, 2010, p. 41). Sebagai organisasi yang ingin mencapai tujuannya mendirikan negara Islam maka HTI harus masuk dalam sistem parlemen namun membutuhkan waktu yang tepat (Abdurrahman, 2005, p. 42).

Ditinjau dari segi politik, HTI tidak menyepakati konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sistem politik ini ditolak HTI bahkan dikatakan sistem kufur atau tidak berdasarkan hukum Islam. Alasannya (Jamilah, 2015) pertama, kedaulatan mutlak milik syara' atau ketentuan dari Allah, bukan milik rakyat. Kedua, demokrasi adalah sistem kapitalisme murni. Ketiga, hakim adalah Allah, bukan manusia. Keempat, kebenaran bukan ditentukan suara mayoritas.

Jika ingin mengubah konsep dasar negara, HTI harus bersedia menjadi partai politik resmi yang mengikuti pemilu dan berhasil menjadi pemenang tunggal. Maka dipersilahkan untuk megubah UUD 1945 melalui amandemen ketika bisa disepakati secara bersama-sama. Namun pemerintah menganggap HTI hanya sebagai organisasi masyarakat. Jika HTI melakukan kegiatan politik maka tindakan tersebut telah menyalahi aturan.

4.1.2. GEMA Pembebasan

Sebagai gerakan mahasiswa, Gema Pembebasan melihat mahasiswa dengan idealismenya memiliki potensi cukup besar dalam perubahan sosial dan politik. Namun, mahasiswa selama ini banyak diwarnai oleh berbagai gerakan yang tidak atau kurang berani mengedepankan ideologi Islam. Dengan alasan tersebut, dibentuklah sebuah jaringan dakwah kampus di Indonesia untuk mengkampanyekan pemikiran-pemikiran Islam dan solusi-solusi Islam atas segala permasalahan. Selain itu, mereka berupaya melahirkan kader-kader dakwah mahasiswa yang siap terjun ke masyarakat. Jaringan ini yang kemudian diberi nama Gerakan Mahasiswa Pembebasan atau disingkat Gema Pembebasan dengan motto “Bersatu, Bergerak, tegakkan ideologi Islam.



Sumber : gemapembebasan.or.id

Gambar 5 Lambang GEMA Pembebasan

Gema Pembebasan resmi dibentuk tanggal 28 Februari 2004 di Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia (GEMA Pembebasan, 2012). Di tempat dan waktu yang sama, diluncurkan pula Website Gema Pembebasan dengan alamat gemapembebasan.or.id. Website ini menjadi salah satu media publikasi opini dan ide-ide Gema Pembebasan. GEMA Pembebasan mempunyai visi dan misi sebagai berikut (GEMA Pembebasan, 2012):

Visi

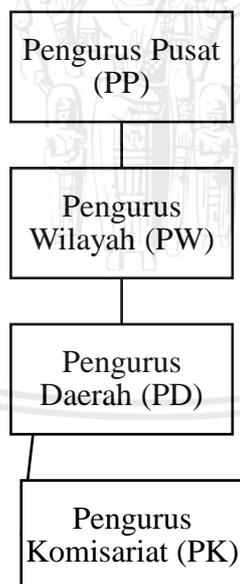
1. Menjadikan Ideologi Islam sebagai mainstream gerakan mahasiswa di Indonesia.
2. Terbentuknya opini Islam Ideologis di kalangan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa di Indonesia

Misi

1. Mengembangkan manajemen pengelolaan opini ideologi Islam sehingga memiliki daya gugah yang membangun kesadaran politik dan daya pembebas terhadap seluruh faktor yang membelenggu Islam.

2. Membangun jaringan pergerakan mahasiswa Islam Ideologis di seluruh Indonesia.
3. Mengembangkan sistem pendukung bagi transformasi ideologi Islam di kalangan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa.
4. Membentuk kader pergerakan mahasiswa Islam yang ideologis dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan opini.

Sama seperti HTI, setelah dibentuk Gema Pembebasan terus menyebar di Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga perguruan tinggi. Kepengurusan tersebut terstruktur dari Pengurus Pusat (PP) di tingkat nasional, Pengurus Wilayah (PW) di tingkat provinsi, Pengurus Daerah (PD) di tingkat kabupaten/kota, dan Pengurus Komisariat (PK) di tingkat perguruan tinggi.



Sumber: Diolah oleh peneliti

Gambar 6 Struktur Kepengurusan Wilayah GEMA Pembebasan
Pada konteks GEMA Pembebasan Malang, terdapat Pengurus
Komisariat yang ada di kampus di bawah struktu Pengurus Daerah Kota

Malang. Sebagai organisasi yang berafiliasi atau “anak” jaringan HTI (Setyawan, 2017), pada dasarnya tujuan gerakan dari GEMA Pembebasan Malang saling bersinggungan. Dakwah yang dilakukan bukan hanya untuk melakukan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk kegiatan sehari-hari, tapi secara khusus untuk mengajak menerapkan ideologi Islam sebagai *mainstream* pergerakan. Termasuk dalam menegakkan negara Islam berdasarkan khilafah Islamiyah. Dalam setiap kegiatannya, GEMA Pembebasan Malang selalu menyuarakan Islam sebagai pedoman dalam setiap kehidupan baik bermasyarakat maupun bernegara. *Thariqah* GEMA Pembebasan Malang melihat syariat Islam hanya dapat dijalankan pada sistem khilafah, bukan pada sistem republik, federal, maupun bentuk pemerintahan lainnya.

Dalam proses gerakan sosial terdapat tahap-tahap yang dilalui. Tahapan tersebut dimulai dari kemunculan, penggabungan, tahap birokratisasi. Dalam konteks GEMA Pembebasan Malang terdapat tahapan-tahapan di dalam proses gerakan sosial.

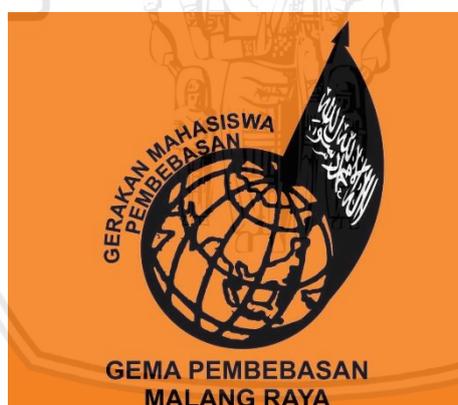
TAHAP KEMUNCULAN. GEMA Pembebasan Malang didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya sedang tidak baik-baik saja. GEMA Pembebasan Malang memandang salah satu permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini yaitu dominasi pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar ideologi Islam. Dominasi pemikiran tersebut dianggap kufur sehingga merusak aspek kehidupan umat Islam mulai dari politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Pemikiran tersebut dikuasai dua ideologi besar yaitu sosialisme dan liberalisme. Menurunnya pengaruh sosialisme dan liberalisme semakin

mendominasi. Semakin banyak negara yang ikut tertular termasuk negara-negara Islam. Pemikiran tersebut selalu diikuti dengan kapitalisme, demokrasi, globalisasi, dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat termasuk mahasiswa. Dengan demikian umat Islam tidak menerapkan ideologi Islam secara keseluruhan.

Akibat dari dominasi pemikiran tersebut, terdapat kelompok-kelompok mahasiswa muslim yang menganggap dirinya sebagai kelompok nasionalis, plural, liberal, atau sekuler. Kelompok-kelompok ini turut menyebarkan ide-idenya di kalangan mahasiswa. Belum lagi ide-ide terkait kebebasan beragama, kebebasan bertingkah laku, gender, hingga akulturasi budaya. Sehingga banyak orang hanyut dan meninggalkan nilai-nilai Islam.

Pandangan lain adalah belum ada gerakan mahasiswa yang mengedepankan ideologi Islam. Gerakan mahasiswa yang menjadikan Islam sebagai solusi permasalahan yang dihadapi melalui pergerakan dakwah. GEMA Pembebasan Malang melihat gerakan-gerakan mahasiswa yang fokus pada politik, kemasyarakatan, hukum, ekonomi, dan sebagainya menyampingkan ideologi Islam. Oleh karena itu perlu pembinaan pemikiran kepada mahasiswa agar dapat menjadi figur yang bertakwa kepada Allah dan dapat melakukan penyadaran di tengah-tengah umat Islam. Dengan sadarnya umat dengan pemikiran Islam akan membawa ke dalam kejayaan Islam. Dari pandangan-pandangan tersebut munculah tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

TAHAP PENGGABUNGAN. Setelah melewati tahap kemunculan, suatu gerakan sosial perlu mendefinisikan dirinya sendiri. Setelah Pengurus Pusat pada tahun 2004, GEMA Pembebasan terus menyebar ke seluruh Indonesia termasuk di Kota Malang. GEMA Pembebasan di Kota Malang dimulai pada tahun 2008 melalui acara peresmian yang dilakukan di luar kampus. Pada awal kepengurusan, GEMA Pembebasan Kota Malang dipimpin oleh Akbar sebagai mahasiswa UM. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh mahasiswa UM dan UB. Seiring berjalannya waktu GEMA Pembebasan Kota Malang (dalam beberapa akun media sosial memakai nama GEMA Pembebasan Malang Raya) membentuk komisariat yang bergerak di dalam kampus yang tersebar di daerah Malang.



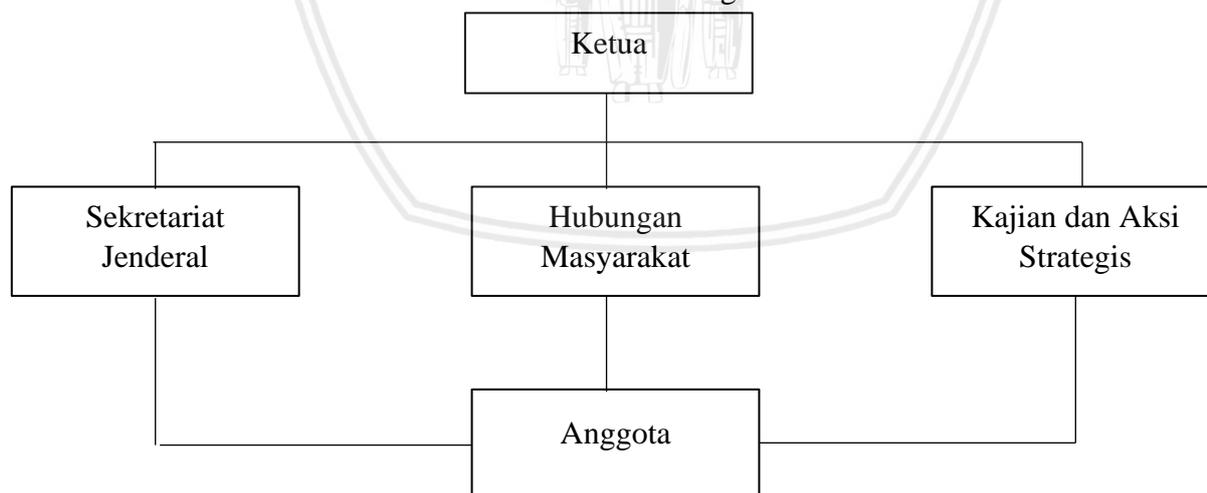
Sumber: *GEMA Pembebasan Malang Raya*

Gambar 7 GEMA Pembebasan Malang Raya

TAHAP BIROKRATISASI. Suatu gerakan sosial harus memiliki sifat-sifat birokrasi agar menjadi sebuah kekuatan politik. Empat tahun pasca pendirian, GEMA Pembebasan mulai masuk daerah Malang pada tahun 2008. GEMA Pembebasan Malang Raya didirikan oleh aktivis-aktivis kampus salah

satunya yaitu Akbar sebagai ketua pertama dan didirikan di luar kampus yang ada di Malang. Setelah itu GEMA Pembebasan Malang Raya terus berkembang, mulai dari berdirinya Komisariat UM hingga tersebar di kampus-kampus yang ada di Malang. Hal itu juga diikuti oleh sistem birokrasinya. Sehingga sifat-sifat birokrasi membuat GEMA Pembebasan semakin mapan karena ketergantungan terhadap pemimpin akan sedikit menurun dan digantikan oleh anggota yang mumpuni.

Saat ini (periode 2018-2019) GEMA Pembebasan Malang Raya memiliki struktur organisasi mulai dari Ketua, Sekretariat Jenderal, Hubungan Masyarakat, serta Kajian dan Aksi Strategis. Seperti pada organisasi mahasiswa pada umumnya, mereka membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berfungsi sebagai aturan pokok bagi fungsional dalam menjalankan tugasnya. Jika suatu gerakan sosial tidak mempunyai sifat birokrasi maka akan berisiko mudah hilang.



Sumber: diolah oleh peneliti

Gambar 8 Struktur GEMA Pembebasan Malang

GEMA Pembebasan Malang dalam melakukan aktivitasnya mengacu pada program kerja rutin. Program kerja yang disusun dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai penunjang terlaksananya strategi dalam mencapai tujuan mereka. Program kerja tersebut yaitu:

1. Training Pembebasan (TP)

Training Pembebasan menjadi langkah awal dalam proses kaderisasi GEMA Pembebasan Malang diagenda kaderisasi dan penguatan serta internalisasi visi, misi, dan budaya gerakan mahasiswa pembebasan.

2. Halaqoh Kader GEMA Pembebasan

Halaqah Kader GEMA Pembebasan merupakan agenda pembinaan rutin mingguan bagi kader-kader GEMA Pembebasan Malang.

3. Membuat dan menyebarkan Opini Tempel dan Media Pembebasan

Opini tempel dan Media Pembebasan terbit dalam jangka waktu tertentu yang membahas berbagai berita dan isu baik nasional maupun internasional dengan solusi Islam.

4. Dialogika

Dialogika digunakan untuk mengembangkan diskursus pemikiran, wacana, serta Analisa yang dikemas dengan dialog interaktif. Forum ini dihadiri oleh panelis dari berbagai perspektif, dari dalam maupun luar GEMA Pembebasan Malang.

5. Aksi

Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan sikap dan pendapat GEMA Pembebasan Malang terhadap isu yang sedang berlangsung di tempat publik.

Bagi GEMA Pembebasan Malang, untuk mencapai tujuannya mereka harus menyuarkan ajaran Islam diperlukan organisasi dan kader yang mumpuni. Dua hal tersebut untuk menciptakan strategi dakwah yang efektif dan efisien. Strategi dakwah yang baik adalah strategi dakwah yang mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Perekrutan GEMA Pembebasan Malang juga menjadi media perekrutan bagi HTI. Kondisi ini sesuai dengan cara HTI dalam melakukan rekrutmen di kampus-kampus. Rekrutmen ini masuk melalui cara-cara yang dilakukan GEMA Pembebasan Malang tanpa membawa nama HTI. Namun, GEMA Pembebasan Malang hanya salah satu dari organisasi yang bermantel HTI. Ada organisasi lain seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Muslimah HTI. Organisasi bermantel HTI ini sengaja menyamar untuk melakukan rekrutmen halus melalui sarana religius dan intelektual, agar mahasiswa tidak melihat lembaga tersebut sebagai sebuah gerakan radikal. Kaitannya dengan GEMA Pembebasan, organisasi ini menjadi salah satu medium bagi HTI untuk menyampaikan pesan-pesan dan mengikut sertakan mereka dalam penegakan syariat Islam. Keberadaan lembaga-lembaga seperti ini menjadi instrumen penting bagi HTI. Dari kelompok kecil seperti ini lebih mudah untuk mensosialisasikan ide-ide dan menyebar pengaruhnya kepada mahasiswa. Sebagian besar proses rekrutmen GEMA Pembebasan Malang berlangsung melalui hubungan interpersonal antara aktivis GEMA Pembebasan

dengan calon anggota. Mereka memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada dan ikatan interpersonal.

Halaqah Kader Pembebasan salah satu model penting bagi pendidikan para anggota GEMA Pembebasan Malang. Dalam halaqah, anggota secara intens melakukan pertemuan setiap minggu dengan materi yang sudah dirancang secara sistematis. Pertemuan ini berisikan kurang lebih 5 orang dalam suatu kelompok. Metode ini agar materi yang diberikan lebih mudah diterima oleh *Mad'u* (sasaran kaderisasi yang merupakan mahasiswa yang tertarik dengan belajar Islam dengan GEMA Pembebasan Malang). Referensi ini menjadi alat untuk kaderisasi ideologi agar melanjutkan tongkat estafet perjuangan GEMA Pembebasan Malang. Kitab ini menjadi dasar sebelum masuk ke kitab-kitab lainnya seperti, *Nizham al-hukm fi al-Islam*, *Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, dan *Ad-Daulah al-Islamiyah*.

Sebagian besar materi tersebut terkait dengan kitab-kitab Taqiyuddin an-Nabhani. Salah satunya kitab *Nizham Al-Islam*. Dalam kitab tersebut terdapat dua tema umum (Safari, 2018). Pertama tidak layaknya ikatan nasionalisme, kesukuan, kemaslahatan, dan kerohanian dijadikan pengikat antar manusia dalam kehidupannya. Kedua, terkait dengan ideologi yang ada di luar Islam adalah salah dan Islam itu sendiri satu-satunya yang benar, layak, dan akan berhasil dalam mengatur kehidupan manusia.

4.2. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Keberadaan HTI dianggap pemerintah sebagai ancaman karena keinginannya mengubah ideologi Pancasila. HTI mengupayakan untuk mewujudkan ide *Daulah*

Islamiyah (Negara Islam). Cita-cita yang dibangun secara umum mengupayakan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia yang melewati batas-batas geografis, kebudayaan, dan politik bangsa-bangsa. Sebelumnya ide Negara Islam di Indonesia terlebih dahulu muncul sebelum HTI berkembang yang muncul saat Kartosuwiryo melakukan pemberontakan DI/TII di masa pasca-kemerdekaan. Bentuk lain juga muncul dalam gerakan Negara Islam Indonesia.

Pada 8 Mei 2017, pemerintah secara resmi mengambil sikap terhadap keberadaan HTI. Wiranto selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkumham) mengumumkan bahwa pemerintah akan membubarkan organisasi tersebut untuk mengarahkannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). Secara administrasi tata negara, organisasi masyarakat atau perkumpulan yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum. Sebaliknya, ormas atau perkumpulan bila tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak Kemenkumham tidak akan memberikan SK tersebut.

Sebelumnya HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum perkumpulan pada 2 Juli 2014 dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 secara elektronik atau melalui website Administrasi Hukum Umum (ahu.go.id). Namun pada 19 Juli 2017, Surat Keputusan pencabutan Badan Hukum

perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir Indonesia keluar sebagai tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI.

Ada lima poin penting pernyataan Pemerintah tentang HTI, yaitu (Khadafi, 2017):

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah berhubungan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.
3. Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
4. Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI.
5. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

Meskipun status badan hukum HTI telah dicabut oleh pemerintah, tetapi kelompok kecil di kampus-kampus yang menjadi cikal bakal HTI masih tetap ada. Begitu pula anggota HTI dan GEMA pembebasan yang ada di kampus. Sebagai organisasi afiliasi, dengan kesamaan *fikrah*, GEMA Pembebasan ikut terkena dampak. Bukan hanya organisasinya, para anggota dan simpatisan juga ikut terdampak.

4.3. Karakteristik Informan

4.3.1. HNA

HNA merupakan Ketua Umum GEMA Pembebasan Kota Malang yang membawahi GEMA Pembebasan Komisariat kampus yang ada di Malang. Ia merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang Angkatan 2012. Masa jabatannya sebagai ketua dimulai sejak 2018. Selain itu ia juga merupakan anggota HTI Kota Malang.

Sebagai ketua ia bertugas sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan dan urusan GEMA Pembebasan Kota Malang, baik intern maupun ekstern. Selain itu memberikan petunjuk pengarahan dan bantuan serta mempertanggungjawabkan hasil kerja kepengurusan GEMA Pembebasan Kota Malang.

Dalam penelitian ini, informasi dari HNA adalah tentang pemaknaan GEMA Pembebasan dan HTI, pembubaran HTI, kondisi GEMA Pembebasan dan HTI pasca pembubaran, serta kegiatan GEMA Pembebasan dan HTI.

Informasi dari HNA diharapkan dapat memberikan gambaran tentang GEMA Pembebasan dan HTI.

4.3.2. TSP

TSP merupakan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Malang Angkatan 2013. Masuk menjadi anggota GEMA Pembebasan Kota Malang pada tahun 2016 dan pada 2018 menjadi Humas. Ia juga merupakan simpatisan HTI Kota Malang. Sebagai ketua Bidang Humas bertindak sebagai koordinator kerja serta menjadi penanggung jawab, mengurus dan bertanggung jawab terhadap media sosial GEMA Pembebasan Kota Malang.

Dalam penelitian ini ia berperan memberikan gambaran tentang GEMA Pembebasan, pembubaran HTI, menjelaskan hubungan GEMA Pembebasan Kota Malang dengan HTI Kota Malang, serta kegiatan GEMA Pembebasan di kampus-kampus yang ada di Kota Malang.

4.3.3. KU

KU merupakan anggota GEMA Pembebasan Komisariat Universitas Negeri Malang khususnya bidang Kajian Strategis. Ia mengambil studi Teknik Mesin angkatan 2015. Sebagai anggota ia menjalankan tugas di bidangnya dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Dalam penelitian ini ia menjelaskan dan memberikan gambaran kondisi GEMA Pembebasan pasca Pembubaran HTI di dalam kampus Universitas Negeri Malang. Selain itu ia menjadi narasumber pendukung untuk menguatkan serta membenarkan hasil temuan dan membenarkan hasil wawancara dari responden utama.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Gerakan GEMA Pembebasan Malang Pasca Pembubaran HTI

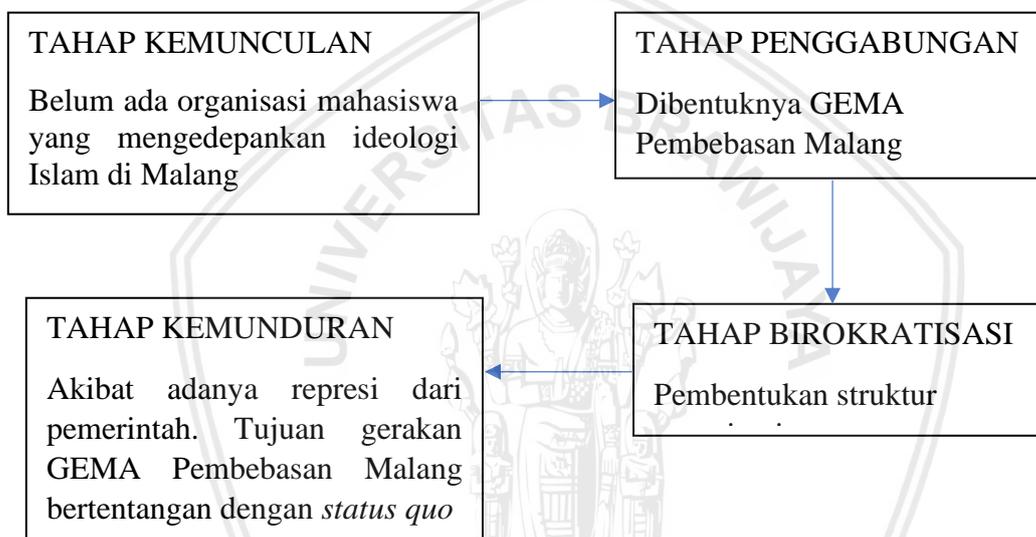
Terdapat masalah-masalah dalam organisasi keagamaan. Agar berhasil dalam mempengaruhi masyarakat, organisasi tersebut harus berhasil dalam dua sektor (Nottingham, 1985). Di satu pihak organisasi tersebut harus menertibkan kebiasaan-kebiasaan para anggotanya sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Di lain pihak, jika organisasi tersebut ingin mempengaruhi masyarakat yang lebih luas, mereka harus mengembangkan organisasi dan memperbesar pengaruhnya yang potensial dengan cara memasukkan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan di luar lingkungan mereka. Dilema usaha untuk mempengaruhi masyarakat berhubungan dengan masalah mempengaruhi tingkah laku manusia sesuai dengan organisasi keagamaan itu tidak sejalan dengan tujuan-tujuan konvensional masyarakat dan lembaga-lembaganya. Dengan kata lain terdapat konflik mendasar antara kepentingan keagamaan dengan masyarakat duniawi.

Sebagai organisasi yang berafiliasi atau “anak” jaringan HTI Malang, tujuan GEMA Pembebasan Malang saling bersinggungan. Dakwah yang dilakukan bukan hanya untuk melakukan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk kegiatan sehari-hari, tapi secara khusus untuk mengajak menerapkan ideologi Islam sebagai *mainstream* pergerakan. Termasuk dalam menegakkan negara Islam berdasarkan Khilafah Islamiyah.

Gerakan yang sama seperti di atas menjadi latar belakang pembubaran HTI. Alat untuk mencabut status badan hukum HTI yaitu Perppu Ormas No. 2 Tahun

2017 berisikan larangan menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Macionis (Sukmana, 2016) dalam proses gerakan sosial terdapat tahap-tahap yang dilalui. Tahapan tersebut dimulai dari kemunculan, penggabungan, tahap birokratisasi, hingga penurunan. Pada satu titik, gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya dan gerakan GEMA Pembebasan Malang pasca pembubaran HTI berada pada titik kemunduran.



Sumber: Diolah oleh peneliti

Gambar 9 Tahap Gerakan GEMA Pembebasan Malang

Pasca pembubaran, HTI berupaya melawan lewat jalur hukum. Namun, mengenai SK pencabutan Badan Hukum HTI, menurut pemerintah merupakan tindakan tegas yang diberikan karena melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan UUD 1945. HTI seharusnya setelah mendapatkan status badan hukum, wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum (Humas Administrasi Hukum Umum, 2017).

Langkah yang diambil yaitu pada Kamis 23 November 2017 digelar sidang perdana gugatan HTI terhadap langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya. Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan 41 alasan menggugat keputusan Surat Keputusan Hukum dan Ham Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017. Salah satu alasannya, doktrin khilafah yang dilakukan oleh HTI tidak bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, doktrin khilafah dianggap tidak masuk ke dalam paham yang dilarang UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, yaitu atheisme, komunisme, dan marxisme. Dalam persidangan PTUN, HTI kalah. Pasca putusan PTUN, HTI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan status badan hukum perkumpulannya. Pendaftaran kasasi ke MA dilakukan pada 19 Oktober 2018 melalui kuasa hukum HTI. Namun, pada 15 Februari 2019, MA menolak kasasi yang diajukan. Dengan demikian Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI tetap berlaku.

Menurut Macionis (1999) terdapat alasan mengapa gerakan sosial mengalami kemunduran. Alasan pertama, aktivitas gerakan GEMA Pembebasan Malang dapat mengalami kemunduran jika telah berhasil menerapkan syariat Islam dan sistem pemerintahan khilafah. Namun di masyarakat penerapan hukum Islam secara kaffah atau keseluruhan belum tercapai dan sistem pemerintahan Indonesia belum menerapkan khilafah Islamiyah. Alasan lainnya, konsep syariat Islam dan kepemimpinan khilafah tidak diterima dalam bagian dari perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan alasan kemunduran gerakan sosial

akibat tidak diterimanya tujuan yang ingin dicapai karena bertentangan dengan *status quo*.

Alasan kedua, GEMA Pembebasan Malang mengalami kemunduran karena gerakan karena adanya tekanan terutama pihak eksternal, yaitu pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keluarnya Perppu Ormas dan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum membuat status badan hukum HTI dicabut. Sebagai organisasi afiliasi dan memiliki tujuan yang sama dengan HTI memunculkan resistensi gerakan terhadap gerakan GEMA Pembebasan Malang.

Setiap gerakan sosial, selain ada pihak yang mendukung, tidak akan lepas dari adanya pihak yang menentang atau menolak. Tujuan gerakan sosial yang menginginkan adanya perubahan sosial atau menolak gerakan perubahan sosial, maka terdapat orang atau pihak yang menginginkan gerakan sosial tersebut berhasil (Locher, 2002). GEMA Pembebasan Malang ingin menyadarkan ajaran-ajaran yang ada di luar Islam merupakan permasalahan yang ada di masyarakat dan perisai khilafah dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan dari sistem demokrasi. Perlawanan atau penolakan terhadap GEMA Pembebasan Malang berasal dari mereka yang diuntungkan jika gerakan tersebut mengalami kegagalan. Locher (2002) menyebutkan terdapat empat bentuk resistensi terhadap suatu gerakan sosial, yaitu ejekan, kooptasi, kontrol sosial formal, dan kekerasan.



Sumber : Instagram, Twitter, dutaislam.com

Gambar 10 Bentuk resistensi

Ejekan dapat menjadi cara yang sangat efektif dalam menolak atau melawan gerakan GEMA Pembebasan Malang karena mudah disampaikan. Mengejek tujuan, pemimpin, atau bagian dari suatu gerakan lain dari GEMA Pembebasan Malang sering di dapat pasca putusan sidang terhadap HTI. Hasil putusan tersebut berimbas pada GEMA Pembebasan Malang sebagai bentuk resistensi dalam bentuk berita, *meme*, atau berupa pernyataan-pernyataan dari pihak eksternal. Ejekan yang dibentuk bukanlah suatu hal yang kebetulan karena digunakan untuk melawan gerakan khilafah islamiyah secara hati-hati. Dengan ejekan tersebut dapat menghilangkan harga diri dari suatu gerakan.

“tidak sedikit orang-orang yang ketika awal-awal itu, ketika Perppu Ormas itu dikeluarkan dan kita yang jadi

sasaran banyak yang mengolok-olok. Bukan orang HTI yang mengolok-olok.”

(Hasil wawancara HNA 27 Maret 2019 Pukul 15.27 WIB)

Sering kali terjadinya suatu gerakan sosial justru tidak diinginkan para pemimpin sosial dan politik. Resistensi diberikan melalui kontrol sosial dengan menggunakan legitimasi wewenang. Pasca pembubaran HTI, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi melalui Menteri Mohamad Nasir meminta seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia memutuskan hubungan dengan pihak-pihak yang berafiliasi dengan HTI. Pihak-pihak tersebut merupakan civitas akademika maupun organisasi mahasiswa.

Melalui instruksi tersebut, sejumlah kampus di Kota Malang mengambil langkah-langkah untuk menyempitkan ruang gerak aktivitas HTI. Pelarangan tersebut untuk melarang penyebaran tujuan gerakan yang dianggap pemerintah bertentangan ideologi Pancasila melalui pengikut maupun organisasi yang berkaitan dengan HTI. Rektor Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Malang ikut mengambil langkah-langkah tersebut (radarmalang.id, 2017).

Langkah ini membuat gerakan GEMA Pembebasan Malang juga ikut menyempit. Di Universitas Negeri Malang (UM) melalui instruksi Rektor akan mendata dan menasihati dosen, mahasiswa yang terindikasi mengikuti gerakan yang berkaitan dengan HTI. Ketua Gema Pembebasan Universitas Negeri Malang (GEMA Pembebasan UM) mendapatkan panggilan oleh birokrat kampus.

Semenjak pemanggilan tersebut, GEMA Pembebasan UM mulai mengamankan gerakannya dan mulai menutup diri untuk mengamankan para anggotanya yang berkuliah di UM.

“Sama civitas. Ya di panggil sama atasan, di tanya-tanyain. Malah jadi ladanglah buat menyampaikan. Jadi seolah-olah di kasih ruang untuk kita menyampaikan gitu. Dan ga sampai di drop out, ya tetap kuliah maksudnya cuma disampaikan gimana sih GP di UM gitu... Ini loh mas jadi kita harus tahu sebenarnya kampus itu ga begitu ngurusin itu. Cuman itu kan ada tekanan dari Dikti, dari pemerintah kan.”

(Hasil wawancara KU 25 April 2019 Pukul 20.00 WIB)

Resistensi di atas memberikan pengaruh bagi gerakan GEMA Pembebasan Malang. Beberapa nama pengurus dari GEMA Pembebasan Malang di beberapa komisariat kampus digantikan dan nama baru tidak ditampilkan ke publik, khususnya mereka yang masih berkuliah. Langkah tersebut diambil setelah adanya Perppu Ormas, pencabutan status badan hukum HTI, dan pemanggilan beberapa anggota GEMA Pembebasan Malang di beberapa kampus. Langkah ini sudah menjadi kesepakatan bagi seluruh anggota bahwa pengurus GEMA Pembebasan yang ada di kampus agar di rahasiakan. Di khawatirkan pengurus-pengurus yang ada di kampus terganggu kegiatan kuliahnya. Tetapi, secara gerakan tetap berjalan.

Perubahan yang terjadi muncul dalam anggota GEMA Pembebasan Malang. Pasca pembubaran muncul tantangan antara anggota yang berpegang teguh pada ideologi mereka tanpa kompromi dengan mereka yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial politik. Ini memunculkan pertanyaan bagi anggota GEMA Pembebasan apakah mau konsisten secara ideologis atau sedikit berkompromi

dengan perubahan yang ada. Bagi mereka yang konsisten akan tetap bertahan, namun ada juga yang berkompromi sehingga meninggalkan ajaran gerakan ini.

“Iya (berkurang) terutama ya yang baru-barulah dan rata-rata kalo cerita-cerita dari teman-teman yang masih belum berkeluarga. Ya pertentangan yang berat bukan dari Perppu Ormasnya sendiri tapi dari keluarganya, bapak ibunya. Kalo belum berkeluarga ya otomatis entah nanti dicabut uang bulanannya atau apa. Itu kan ada. Kalo sudah berkeluarga kan ya terus terang.”

(Hasil wawancara HNA 27 Maret 2019 Pukul 15.27 WIB)

Bagi mereka yang konsisten, mereka tidak berhenti untuk menolak demokrasi. Mereka akan tetap menjadi oposisi pemerintah yang sekuler dan meninggalkan konsep nasionalisme dan menawarkan Khilafah sebagai jalan baru. Dakwah GEMA Pembebasan dapat bertahan sepanjang tersedianya legitimasi oposisi seperti Indonesia. Kegiatan oposisi di Indonesia dilindungi oleh hukum. Namun, mereka tidak dapat berkembang di negara-negara non-demokratis yang tidak tersedianya legitimasi oposisi.

Jumlah keanggotaan ikut menyusut dan hal ini telah diprediksi oleh pengurus GEMA Pembebasan Malang. Banyak anggota yang keluar karena adanya tekanan dari luar seperti orang tua dan keluarga. Tetapi tidak ada angka pasti berapa anggota sebelum adanya pembubaran HTI. Jumlah dan nama anggota dirahasiakan, hanya pengurus dan anggotanya sendiri yang mengetahui terkait anggota GEMA Pembebasan Malang. Hal ini dilakukan untuk mencegah fitnah bahkan pemanggilan dari pihak-pihak di luar organisasi dengan berbagai alasan. Mereka takut pendidikan mereka tidak dapat di sokong oleh orang tua mereka lagi. Humas GEMA Pembebasan Malang menyebut anggota tersebut adalah anggota yang layu

dan mulai rontok dan tersisa beberapa anggota yang bertahan. Dengan berkurangnya anggota GEMA Pembebasan Malang, simpatisan HTI pun ikut berkurang. GEMA Pembebasan Malang menjadi salah satu pintu gerbang mahasiswa untuk bergabung dengan HTI.

“Kita bertambah cuma ada beberapa yang di sana memutuskan untuk berhenti juga ada. Tapi sebenarnya ini sudah diprediksi sih. Istilahnya kaya pohon lah. Yang rontok itu yang sudah mulai layu-layu gitukan. Tapi ada sisi positifnya lagi, ada yang mencari tahu tentang kita, malah ada yang ikut masuk. Artinya satu banding dua lah, yang satu ini keluar dua ini yang masuk... Kalo (anggota) GP Kota Malang ada sekitar 5... Nah ini di UM-nya ada sekitar 10 lebih, kalo di UB juga sama sih... Ya sekitar kalo Malang itu ada 50an.

(Hasil wawancara TSP 17 April 2019 Pukul 19.45 WIB)

Saat pemanggilan mahasiswa GEMA Pembebasan Malang di UM, hal ini menjadi ladang untuk menyampaikan gerakan dan aspirasi mereka. Tanggapan yang diberikan oleh birokrat UM juga tidak sampai mengeluarkan mereka. Terdapat juga mahasiswa-mahasiswa yang tidak tahu setelah mendengar kabar pembubaran HTI mereka mencari tahu tentang GEMA Pembebasan Malang.

Kelompok keagamaan dapat menghadapi situasi seperti ini dengan dua cara (Nottingham, 1985). Pertama mereka dapat menyelamatkan anggota-anggotanya dari dunia yang jahat dengan menarik mereka sejauh mungkin. Kedua, sebagai alternatif, mereka dapat melibatkan diri secara aktif dalam pertempuran melawan dunia itu dan berusaha mengubahnya. Untuk kelompok yang menarik diri biasanya tetap kecil dan mempunyai pengaruh yang agak sedikit pada masyarakat yang lebih luas. Tetapi jika ada kelompok propagandis militan dapat mempengaruhi dunia luar hanya jika memperluas keanggotaan mereka.

Jika putusan pemerintah yaitu untuk membubarkan HTI, maka pekerjaan sesungguhnya adalah menghentikan penyebaran ideologi Khilafah Islamiyah. Pekerjaan tersebut jauh lebih berat dibandingkan dengan membubarkannya melalui jalur hukum. Meskipun di beberapa negara lain telah lebih dulu membubarkan Hizbut Tahrir, namun yang terjadi di Kirgiztan, Kazakhstan, dan Tajikistan, mantan anggota Hizbut Tahrir melanjutkan perjuangan mereka secara terselubung meski telah dinyatakan ilegal (Wiwoho, 2017). Di beberapa negara tersebut, anggota dan simpatisan Hizbut Tahrir tetap bertahan dan memegang teguh nilai ajarannya.

Berakhirnya gerakan HTI oleh pemerintah merupakan pandangan dari sudut hukum, sehingga perlu dilihat pergerakannya di dalam masyarakat, termasuk di Kota Malang. Sebab, putusan keadilan bersifat secara keseluruhan, pencabutan status badan hukum HTI berlaku dari pusat hingga ke daerah. HTI memang sudah menjadi organisasi ilegal, namun para kader dan simpatisan berhak untuk berkumpul dan berserikat dengan organisasi lain. Kader dan simpatisan HTI bisa menganggap payung organisasi mereka telah dibubarkan, tetapi gerakan yang mereka bangun tidak bisa hilang begitu saja, termasuk gerakan GEMA Pembebasan Malang. Organisasi mahasiswa tersebut bukanlah organisasi kemasyarakatan seperti HTI. GEMA Pembebasan Malang hanya organisasi politik yang berada di luar kampus yang menjadi anak jaringan HTI.

Hilangnya posisi HTI membuat kekosongan organisasi gerakan sosial untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam sesuai ajaran mereka. Sebagai organisasi yang telah mandiri, GEMA Pembebasan Malang perlu mempertahankan ajaran syariat Islam dan terus membangun sistem Khilafah Islamiyah. Tujuannya untuk

tetap membangkitkan kembali mahasiswa Islam dari kemerosotan yang parah, membebaskan mahasiswa dari ide-ide, peraturan, sistem perundang-undangan, dan hukum yang berada di luar Islam. GEMA Pembebasan Malang menganggap rezim telah dzalim terhadap Islam karena telah membubarkan HTI yang merupakan buah hasil dari demokrasi.

Gerakan yang dilakukan oleh GEMA Pembebasan Malang yaitu mempertahankan dan meneruskan dakwah meskipun ajaran mereka dilarang pasca pembubaran HTI. Locher (2002, p. 231) berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong, mempertahankan, atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial.

GEMA Pembebasan Malang memahami dakwah sebagai ajakan kepada orang lain untuk menuju jalan kebaikan. Jalan kebaikan yang dimaksud adalah menjalankan kehidupan berdasarkan ideologi dan aturan Islam. Tujuan dilakukannya dakwah bagi GEMA Pembebasan Malang untuk mengajak mahasiswa untuk kembali kepada Islam secara kaffah atau keseluruhan. Ketika mahasiswa pemikirannya sudah secara Islam, mereka akan membutuhkan sebuah sistem untuk penerapan syariat Islam yaitu Khilafah. Meskipun tujuan dakwah mereka mendapatkan resistensi dari berbagai pihak lewat pembubaran HTI. Ini menjadi pedoman bagi GEMA Pembebasan untuk tetap melakukan gerakan mereka.

“Nah ini kita hmm jadi kita mengajarkan pada mahasiswa untuk kembali pada Islam terlebih dahulu. Ketika

pemikirannya sudah Islam, akidahnya sudah Islam, mereka secara tidak langsung kan pasti membutuhkan namanya suatu perisai kan. Yaitu perisainya khilafah. Tujuan utama kita itu memahamkan tentang Islam itu.”

(Hasil wawancara TSP 17 April 2019 Pukul 19.45 WIB)

Dakwah yang dilaksanakan oleh GEMA Pembebasan memiliki tujuan lain selain bentuk ajakan menuju kebaikan secara umum. Secara khusus GEMA Pembebasan mengajak untuk menerapkan ideologi Islam sebagai *mainstream* pergerakan dan juga ajaran menegakkan Negara Islam (*khilafah Islamiyah*). Penerapan ideologi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan agar akidah Islamiyah menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan undang-undang. Sebagai gerakan mahasiswa dimaksudkan untuk mengajak mahasiswa kembali kepada Islam secara total dengan meninggalkan aturan-aturan kufur (tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya). Aturan-aturan yang kufur misalnya seperti aturan demokrasi, kapitalis, dan ajaran yang bukan berasal dari hukum Islam.

Menurut HNA, terdapat 3 metode bagi GEMA Pembebasan untuk mengajak mahasiswa untuk tetap melakukan gerakan meskipun di bawah tekanan rezim pemerintahan. Jika ketiga hal ini tidak dilakukan, dakwah yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan tidak boleh dilangsungkan.

“Karena di thariqah kita Fiqriyyun, Siyasiun, La Unfiyya dalam dakwah kita. Fiqriyyun menggunakan pikiran, Siyasiun menggunakan politik, dan La unfiyya tanpa kekerasan.”

(Hasil wawancara HNA 27 Maret 2019 Pukul 15.27 WIB)

Metode tersebut diartikan sebagai berikut (Lufaei, 2018):

a. *Fikriyyah Al-Islamiyyah*

Tahapan pertama merupakan taraf yang mencakup ajakan berpikir kepada para mahasiswa, khususnya dalam masalah akidah dan syariah. Selain itu adalah mengajak berpikir agar orang yang belum masuk Islam untuk masuk ke dalamnya.

b. *Siyasah*

Dalam metode ini, dakwah yang dilakukan oleh GEMA Pembebasan Malang memiliki tujuan politik, yaitu cita-cita berdirinya negara Islam. Mereka meyakini bahwa politiklah yang akan bisa memelihara setiap urusan masyarakat. Politik yang dilakukan harus politik Islam, artinya politik yang dalam tata aturan, hukum-hukum, dan dalam penyelesaian masalah apa pun yang dihadapi menggunakan syariat Islam.

“Ajaran kita kan yang terkenal khilafah islamiyah padahal ajaran kita ideologi islam. Islam sebagai ideologi. Tujuan kita bukan menegakkan khilafah tapi melanjutkan kehidupan islam dengan menerapkan syariat Islam. Cuma di thariqoh kita syariat Islam itu hanya bisa diterapkan dengan khilafah. Tidak bisa dengan negara republik, federal, atau negara-negara lain.”

(Hasil wawancara HNA 27 Maret 2019 Pukul 15.27 WIB)

Penggunaan metode ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang senantiasa mendidik masyarakat agar mengikuti hukum Islam dan bertolak dari hukum-hukum selain Islam. Dalam urusan negara, hukum yang diberlakukan haruslah hukum Islam bukan UUD 1945 seperti yang ada sekarang. Dasar negara tersebut dianggap haram karena hukum yang dibuat oleh manusia.

c. *La Madiyah*

La Madiyah artinya tanpa kekerasan. GEMA Pembebasan Malang menganggap dakwah tidak boleh ada sedikit pun unsur kekerasan fisik. Hal tersebut dilakukan seperti yang diajarkan Nabi Muhammad ketika menerapkan syariat Islam dan daulah Islam di Madinah. Salah satu kegiatan yang dilakukan GEMA Pembebasan Malang yaitu ikut bergabung dalam Aksi Bela Tauhid yang sempat ricuh di dalamnya. Kericuhan terjadi tersebut terjadi pada 28 Oktober 2018 berlokasi di Alun-Alun Kota Malang. Meskipun terjadi kericuhan, GEMA Pembebasan Malang sangat menghindari terjadinya kericuhan karena bukan bagian dari metode dakwah mereka.

“Kemudian aktifitas, aktifitas juga kita lawan karena aktifitas kita selama ini tidak pernah memakai kekerasan. Cari diseluruh berita ga pernah kita pake kekerasan... Kalo ada anggota yang pake kekerasan, tidak boleh, bukan anggota buat kita. Termasuk persekusi bendera Tauhid, itu kan dari teman-teman sendiri yang mengikrarkan sudah ditonjok oleh salah satu ormas, tapi kita ga melawan. Kita lebih baik menghindar. Tadi kan ditanya apakah terjadi crash, mungkin ada cuma kita menghindari betul terutama dengan NU.”

(Hasil wawancara HNA 27 Maret 2019 Pukul 15.27 WIB)

Pada dasarnya tujuan gerakan dari GEMA Pembebasan Malang saling bersinggungan. Dakwah yang dilakukan bukan hanya untuk melakukan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk kegiatan sehari-hari, tapi secara khusus untuk mengajak menerapkan ideologi Islam sebagai *mainstream* pergerakan. Termasuk dalam menegakkan negara Islam berdasarkan khilafah Islamiyah.

Gerakan yang sama seperti di atas menjadi latar belakang pembubaran HTI. Untuk menutupi gagasan yang sama dalam membangun gerakan penegakan syariat

Islam, GEMA Pembebasan Malang membangun gagasan bahwa pemerintah telah dzalim terhadap umat Islam. Di tengah rezim yang dzalim, GEMA Pembebasan Malang melakukan perlawanan sebagai bentuk respon keinginan tegaknya keadilan. Mereka menempatkan diri mereka sebagai oposisi pemerintah layaknya organisasi mahasiswa. Untuk itu seluruh kegiatan GEMA Pembebasan Malang bersifat politik, yaitu mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat melalui kritik terhadap pemerintah. GEMA Pembebasan Malang dalam thariqahnya memperhatikan urusan-urusan masyarakat khususnya mahasiswa sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahannya secara syar'i.

“kita tetap istiqomah aja dengan apa yang kita perjuangkan. Kita tetap menjadi apa yang omek lakukan yaitu jadi oposisi abadi kan seperti itu. Ya kita istiqomah melewati jalan-jalan sana. Tidak memihak pada rezim.”

(Hasil wawancara TSP 17 April 2019 Pukul 19.45 WIB)

Untuk mempertahankan gerakannya, melalui gagasan tersebut GEMA Pembebasan Malang tetap melakukan kegiatan mereka yang disusun dalam program kerja. Program kerja ini digunakan sebagai upaya perlawanan untuk tetap melakukan dakwah dan mempertahankan eksistensi mereka. Taktik dan strategi yang dibuat GEMA Pembebasan Malang yang dipilih dapat diyakini akan mampu dan efektif dalam rangka mencapai tujuan gerakan meskipun pasca pembubaran HTI. Selain ada Training Pembebasan dan Halaqah Kader GEMA Pembebasan, terdapat Opini Tempel, Media Pembebasan, Dialogika, dan Aksi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk gerakan untuk mempertahankan penegakan syariat Islam dan menjaga eksistensi organisasi mereka.

“Opini Tempel” dan “Buletin Suara Pembebasan” yang berisikan tulisan realitas dan kondisi negeri dari isu sosial hingga politik dengan perspektif GEMA Pembebasan. Bagi GEMA Pembebasan Malang perubahan akan terjadi bila masyarakat terbebaskan dari ide-ide rusak dan menggantinya dengan ide-ide Islam. Ide Islam tersebut menjadi sikap, kesadaran, pendapat, dan gerakan bersama menuju perubahan. Untuk itu GEMA Pembebasan Malang dengan strategi menyampaikan dakwah mendistribusikan tulisan tetap dilakukan. Opini Tempel dan Buletin Suara Pembebasan diterbitkan dalam periode waktu tertentu untuk menyikapi persoalan politik hingga sosial. Lalu, disebarakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum.



Sumber: GEMA Pembebasan Malang

Gambar 11 Media Pembebasan dan Opini Tempel

Tidak banyak orang atau organisasi yang menentang terkait tulisan mereka karena masih banyak yang tidak tahu dan penyebarannya lebih banyak secara personal dengan cara berlangganan atau pemberian secara sukarela. Kalau pun disebarakan di tempat umum, isu dan topik yang dibahas lebih tidak langsung mengarah pada tujuan GEMA Pembebasan Malang, tetapi permasalahan umat.

Pembuatan Buletin Suara Pembebasan dan Opini Tempel dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan pembuatan isu yang akan dibahas oleh komisariat lalu diterbitkan sendiri. Kedua, dengan mendistribusikan terbitan dari Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat seperti GEMA Pembebasan Jawa Timur atau di atasnya.

“Ini kan opini tempel eeh programnya komsat ini yakan. Jadi misalnya kan, membuat isu nih di GP Malang. GP Malang membuat isu yang mau ditanggapi sama komsat. Ya nanti di Komsat pada minggu harus ada opini tempel gitu kan... Setelah itu disebar, ditempel. Di UM kita ada di Teknik, terus ada di MIPA, sama di Sastra. Di UB juga termasuk”

(Hasil wawancara TSP 17 April 2019 Pukul 19.45 WIB)



Sumber: GEMA Pembebasan Malang

Gambar 12 Dialogika

Program kerja selanjutnya yaitu Dialogika. Program kerja ini untuk mengembangkan diskursus pemikiran, wacana, serta analisa yang dikemas dengan dialog secara interaktif. Disertai dengan panelis dari berbagai perspektif dengan menghadirkan para tokoh. Dalam program kerja ini GEMA Pembebasan Malang sebagai tuan rumah dengan mengundang berbagai perspektif yang berasal dari eksternal organisasi mereka. Dialogika juga digunakan sebelum mengadakan aksi atau demonstrasi. Tema yang diangkat banyak pada kritik terhadap pemerintah

yang dianggap dzalim, liberal, dan pro-asing. Meskipun banyak tekanan dari gerakan yang setara, GEMA Pembebasan Malang berani untuk mengundang organisasi mahasiswa seperti KAMMI, HMI, dan GMNI untuk memberikan pandangan lain terkait tema yang diangkat.

Program kerja lainnya yaitu Aksi. Aksi yang dimaksud yaitu unjuk rasa atau demonstrasi. Kegiatan ditujukan untuk menunjukkan sikap dan pendapat terhadap isu yang sedang berlangsung. Pasca pembubaran HTI, organisasi ini berani untuk tampil di depan publik dalam menyuarakan sikap mereka. GEMA Pembebasan Malang mempunyai prinsip ketika melakukan Aksi untuk tidak melakukan tindak kekerasan. Hal itu bertujuan untuk membangun gambaran terhadap masyarakat bahwa Islam sebagai prinsip gerakan GEMA Pembebasan Malang tidak melalui kekerasan. Bahkan jika terdapat represi, GEMA Pembebasan Malang melarang untuk membalas bahkan menginstruksikan massanya untuk mundur. Aksi yang pernah dilakukan pasca pembubaran HTI antara lain yaitu Penolakan Perppu Ormas, Aksi Bela Tauhid, hingga Aksi Bela Hikma Sanggala yang di keluarkan dari kampusnya karena dianggap mahasiswa radikal.



Sumber: GEMA Pembebasan Malang

Gambar 13 Aksi yang dilakukan GEMA Pembebasan Malang

Publikasi melalui media sosial juga menjadi sarana gerakan GEMA Pembebasan Malang pasca pembubaran HTI. Penggunaan media sosial selain untuk menyampaikan gagasan GEMA Pembebasan Malang, tetapi memberikan sikap kepada pemerintah. Banyak publikasi GEMA Pembebasan Malang yang berkaitan dengan kritik atas pemerintah dan ejekan terhadap tokoh-tokoh pemerintah yang telah membubarkan HTI dan menolak sistem Khilafah.

Salah satunya publikasi terkait penangkapan Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh KPK. Publikasi ini bertujuan untuk membela HTI karena banyak Menteri pasca pembubaran HTI membuat kebijakan yang tidak adil bagi mereka. Selain itu, ada, pernyataan sikap GEMA Pembebasan Tolak OBOR China (GEMA Pembebasan Malang, 2019). Publikasi ini sebenarnya hasil dari kegiatan Dialogika yang dipublikasikan. Kebijakan OBOR (One Belt One Road) merupakan kebijakan ekonomi yang digagas Cina terkait investasi dan pembangunan infrastruktur. Terkait kebijakan tersebut GEMA Pembebasan Malang menyatakan bahwa China menggunakan sistem ekonomi neoliberalisme dan sistem yang bukan berasal dari Islam. Sistem ekonomi neoliberalisme perlu diganti dengan sistem ekonomi Islam. Hingga pada akhirnya mengembalikan kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah yang akan mensejahterakan umat.



Sumber: Facebook GEMA Pembebasan Malang

Gambar 14 Publikasi Media Sosial

Kegiatan seminar, kajian, dan halaqah juga tetap berjalan sebagai sarana menjaring anggota. Perbedaannya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di luar kampus akibat adanya represi dari pihak kampus. GEMA Pembebasan tidak mau mengambil risiko untuk melakukan kegiatan di kampus untuk mengamankan para anggota yang dasarnya adalah mahasiswa. Begitu pula dengan Training Pembebasan karena tempatnya di luar kampus dan pesertanya tidak diberitahu lokasi yang akan dijadikan tempat kegiatan. Penggunaan media sosial juga menjadi cara aman untuk melakukan kegiatan mereka. Bentuk kegiatan tersebut meskipun mudah dilihat dan dikomentari. Tetapi semua tertutupi dengan adanya nama GEMA Pembebasan Malang di setiap akun.

“Kemudian ada opini tempel kalo dulu pernah liat ada di UB pernah di tempel di mading. Kemudian ada aksi juga, ya, khususnya pergerakan lah. Kalo memungkinkan kita mengadakan kegiatan cuma kita selalu diluar, belum bisa masuk di kampus. Kalo dulu pernah di UB itu pernah, Gema Pembebasan masuk di Widyaloka sampingnya Rektorat tahun 2009 atau berapa itu. Ada dokumentasinya Karena dulu itu identitasnya belum diketahui. Pasca itu (pembubaran HTI) tidak ada lagi kita adakan acara di dalam kampus. Cuma dulu pernah yang rame itu di Gor pas Simposium Nasional. Kalo diluar kampus banyak, aksi kemudian dialog mahasiswa dan sebagainya.”

(Hasil wawancara HNA 27 Maret 2019 Pukul 15.27 WIB)

Untuk tetap mempertahankan gerakannya, GEMA Pembebasan Malang perlu mencari anggota baru. Hal ini untuk tetap menjalankan dakwah mereka dan mempertahankan eksistensi organisasi mereka. Sebagian besar proses rekrutmen GEMA Pembebasan Malang pasca pembubaran HTI tetap menggunakan hubungan interpersonal antara aktivis GEMA Pembebasan dengan calon anggota. Modus ini agak sulit untuk diketahui publik. Modus yang dipakai yaitu kawan merekrut kawan, anggota keluarga merekrut anggota keluarga, hingga tetangga. Maksudnya jika ada mahasiswa yang berkuliah di Malang yang merupakan kawan, keluarga, atau tetangga mereka dapat menjadi sasaran rekrutmen bagi GEMA Pembebasan. Terutama bagi anggota atau dari keluarga HTI. Kemudian perekrutan ini akan berimbas pada jumlah simpatisan HTI meskipun organisasinya sudah tidak ada. HNA menyatakan bahwa anggota GEMA Pembebasan adalah anggota atau simpatisan HTI. Namun, anggota HTI belum tentu anggota GEMA Pembebasan.

Para perekrut mengajak calon anggota diajak untuk ikut belajar Islam atau peningkatan pengetahuan agama. Calon anggota tersebut awalnya hanya ikut berpartisipasi lewat seminar, kajian, atau halaqoh yang dilaksanakan oleh GEMA Pembebasan Malang atau jaringannya. Namun, bagi beberapa calon kegiatan tersebut tidak diketahui berhubungan dengan GEMA Pembebasan.

“...jadi kita mengajarkan pada mahasiswa untuk kembali pada Islam terlebih dahulu. Ketika pemikirannya sudah Islam, akidahnya sudah Islam, mereka secara tidak langsung kan pasti membutuhkan namanya suatu perisai kan. Yaitu perisainya khilafah. Tujuan utama kita itu memahamkan tentang Islam itu.”

(Hasil wawancara TSP 17 April 2019 Pukul 19.45 WIB)

Ajaran GEMA Pembebasan Malang yang tertanam dalam aktivis mereka, membuat anggotanya aktif mencari anggota baru. Aktivis ini memandang dakwah sebagai pekerjaan seumur hidup bagi setiap muslim. HNA menyebutkan, anggota-anggota tersebut pada pertemuan halaqoh akan dimonitoring sejauh mana mereka mendekati mahasiswa-mahasiswa dalam menyampaikan dakwah.

Model lain dalam melakukan perekrutan GEMA Pembebasan Malang yaitu Training Pembebasan. Program kerja ini merupakan langkah dalam proses kaderisasi GEMA Pembebasan sebagai agenda kaderisasi dan penguatan selain halaqoh. Melalui program kerja ini anggota akan diinternalisasi melalui visi, misi, dan budaya gerakan GEMA Pembebasan. Kaderisasi menjadi kebutuhan internal GEMA Pembebasan Malang yang dilakukan demi kelangsungan dan kelancaran organisasi.



Sumber: GEMA Pembebasan Malang

Gambar 15 Rekrutmen GEMA Pembebasan Malang Tahun 2018

Menurut TSP, meskipun GEMA Pembebasan sudah masuk di Kota Malang pada tahun 2008, namun Training Pembebasan baru efektif pada tahun 2016 ke atas. Justru pasca pembubaran HTI, Training Pembebasan di Malang baru efektif dilaksanakan. Meskipun muncul wacana pelarangan ajaran HTI yang sama dengan GEMA Pembebasan Malang, proses pencetakan kader baru tetap berjalan. Namun langkah ini sebenarnya bukan hal yang pertama kali dalam melakukan kaderisasi. Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan GEMA Pembebasan Malang atau yang belum pernah sama sekali lalu ikut bergabung menjadi peserta dalam Training Pembebasan. Kegiatan ini bersifat wajib bagi anggota yang akan masuk GEMA Pembebasan Malang.

Langkah seperti ini juga banyak diikuti oleh gerakan mahasiswa seperti KAMMI, HMI, dan lainnya. Untuk Training Pembebasan memiliki 2 tahap yang biasa disebut TP1 dan TP2. Kegiatan ini dilakukan di lokasi luar kampus selama dua hari satu malam. Calon anggota digembleng dengan beragam kegiatan mulai dari sesi materi, diskusi, tantangan, sholat berjamaah, sholat malam, tilawah, olahraga, dan berbagai keperluan organisasi lainnya. Materi yang diberikan berubah-ubah setiap pelaksanaannya namun tidak jauh dari problematika umat, perbandingan ideologi, kebangkitan Islam, dan tipologi gerakan mahasiswa. Hingga pada akhirnya peserta Training Pembebasan mengucapkan kesepakatan dan berikrar akan berjuang tanpa Lelah untuk tegaknya Syariah Islam dan naungan Khilafah Islamiyah sebagai solusi tuntas problematika Indonesia dan negara muslim lainnya. Harapannya kader-kader GEMA Pembebasan memiliki

kepribadian Islam, tsaqofah Islam, serta menjadi katalisator perubahan menuju revolusi Islam dengan tegaknya khilafah.

“Jadi kalo misalkan anggota masih ada yang namanya TP 1 atau training pembebasan satu, kalo di HMI kan LK1 kan, sama sebenarnya. TP 1 ya cuma anggota yang sering kita ikutkan dialogika, kalo sudah TP 2 berarti dia sudah menjadi inti dari kepengurusan kita”

(Hasil wawancara TSP 17 April 2019 Pukul 19.45 WIB)

Selain menggunakan para anggotanya, kegiatan GEMA Pembebasan Malang juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajarannya. Mereka mempertimbangkan media sosial untuk medium yang banyak digunakan oleh berbagai gerakan karena banyak pengguna di dalamnya. GEMA Pembebasan Malang sendiri menggunakan Instagram, Facebook, dan Twitter. Media sosial menjadi sarana untuk menyebarkan dakwah.

Lewat media sosial, GEMA Pembebasan dapat berkomunikasi dengan publik secara *online* maupun *offline*. Secara *online*, mereka dapat menyebarkan opini, berbicara satu sama lain, proses tanya jawab melalui komentar, hingga kajian *online*. Selain itu untuk mencari pertemanan atau membangun hubungan dengan para pengguna yang disaring khususnya di daerah Malang yang akan dijadikan teman atau pengikut. Orang-orang yang ikut berkomentar atau menanggapi kiriman dari media sosial mereka dapat atau akan ditemui di dunia nyata. Bahkan mereka berani memberikan nomor telepon. Mereka yang bertemu di dunia nyata akan berdiskusi khususnya masalah yang berkaitan dengan kiriman GEMA Pembebasan Malang di media sosial. Kegiatan ini akan menghasilkan komunikasi dua arah yang

saling mempengaruhi dan diharapkan mahasiswa yang ada di Malang dapat terpengaruhi oleh pemikiran GEMA Pembebasan.

Komunikasi GEMA Pembebasan juga dilakukan melalui jaringan sosial yang mereka punya. Jaringan sosial merupakan suatu struktur sosial yang terdiri dari orang, posisi, korporasi, atau gambaran setiap entitas yang terikat oleh satu oleh satu atau lebih tipe hubungan saling ketergantungan tertentu. GEMA Pembebasan Malang tetap mempertahankan jaringan yang mereka punya untuk melakukan gerakan mereka pasca pembubaran HTI. Jaringan tersebut dipertahankan untuk mempertahankan bentuk kolektif mereka untuk menciptakan perubahan sosial melalui pergerakan mereka. Dengan hal tersebut GEMA Pembebasan Malang dapat memperkuat aktivitas mereka.

Terdapat jaringan penting yang membantu jalannya gerakan GEMA Pembebasan Malang. Pertama, yaitu Hizbut Tahrir Kota Malang karena memiliki tujuan yang sama dengan GEMA Pembebasan Malang. Namun pasca Perppu Ormas, HTI sebenarnya sudah tidak ada termasuk di Kota Malang. Namun anggota, simpatisan, dan aktivitas mereka tetap sama. Sebagai organisasi sayap, HTI berfungsi sebagai pengawas bagi GEMA Pembebasan Malang. Menurut HNA, anggota GEMA Pembebasan Malang merupakan simpatisan HTI. Namun untuk menjadi anggota, ada proses yang diistilahkan dengan nyantri.

Untuk dapat berkoordinasi dengan GEMA Pembebasan Malang, HTI mempunyai Bagian Lajnah Kemahasiswaan yang diisi oleh Ustadz Ismail. Lajnah mahasiswa maupun Humas GEMA Pembebasan Malang saling berkomunikasi

untuk menyalurkan gerakan penegakan syariat Islam. Sedangkan Lajnah Kemahasiswaan di bawah tanggung jawab pimpinan HTI Kota Malang, Ustadz Ishaq.

Kedua, terdapat Muslimah HTI atau Perempuan HTI yang bergerak di ranah kampus seperti di UM. GEMA Pembebasan Malang hanya berisikan laki-laki dan tidak boleh berisi perempuan. Untuk mewadahi gerakan yang sama untuk perempuan maka hadir organisasi tersebut. Sama seperti GEMA Pembebasan Malang, pasca pembubaran HTI, Muslimah HTI mulai menutup diri untuk menghindari resistensi. Koordinasi antara GEMA Pembebasan Malang dan Muslimah HTI termasuk mobilisasi kader dalam mengisi kegiatan di dalam kampus. Selain itu untuk menampung dan melakukan kaderisasi mahasiswa dengan pemikiran yang sama.

“Kalo kita lebih fokus ke ini sih ke gerakannya apa namanya, ke organisasi kita sendiri sih. Soalnya kan, ga jamin sih di sana pun juga ini sih. Cuman kalo aktivis yang gerak di sana rata-rata yang perempuan. Bukan GP sih, cuman sepemikiran aja lah. Iya, pastinya beda kan. Mungkin sampean sudah tahu lah misalnya kampus UB juga gitu. Ada yang laki-laki ada yang perempuan. Cuman kan emang di kita itu emang bagusnya itu, ga ada kemudian komunikasi gitu. Meskipun beda tapi pemikirannya itu sama, juga arah gerakannya.”

(Hasil wawancara KU 25 April 2019 Pukul 20.00 WIB)

Ketiga, GEMA Pembebasan Malang mempunyai kedekatan dengan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Kota Malang. LDK menjadi salah satu basis HTI untuk melakukan kaderisasi sama seperti GEMA Pembebasan Malang. BKLDK sendiri secara nasional didirikan oleh Juru Bicara HTI Ismail

Yuswanto yang lahir di Bogor pada tahun 2004. Pasca pembubaran HTI salah satu Lembaga Dakwah Kampus (LDK) MT-Funa yang ada di Fakultas Peternakan UB di bawah BKLDK harus dibekukan oleh Dekanat (Fherastama, 2018). LDK lain yang di bawah BKLDK juga memiliki kasus yang sama. Salah satu pengurus BKLDK yaitu AN mengaku berasal dari kelompok HTI. Tidak hanya LDK MT-Funa, LDK Badan Dakwah Masjid Al-Hikmah di UM memiliki kasus yang tidak berbeda jauh seiring berkembangnya isu gerakan HTI yang berbahaya. Dalam melakukan dakwahnya, LDK yang berada di bawah koordinasi BKLDK mulai tertutup. Kegiatan dan kaderisasi yang dapat disusupi oleh GEMA Pembebasan ikut tertutup.

Organisasi-organisasi formal tersebut sengaja dibuat tampak netral dari organisasi tertentu, namun sebenarnya berafiliasi dengan HTI. Kegiatan-kegiatan organisasi tersebut dibentuk secara tidak langsung dengan ide-ide HTI. Anggota yang berpotensi atau tertarik dengan ide-ide tersebut, akan diajak untuk ikut bergabung dengan organisasi afiliasi lainnya. Berbeda dengan GEMA Pembebasan Malang yang merupakan organisasi politik, BKLDK merupakan organisasi kerohanian. Namun kedua organisasi tersebut mempunyai kedekatan yang sama dengan HTI dan memiliki paham yang sama. Jaringan kedua organisasi ini bersifat koordinasi dan melakukan mobilisasi sumber daya mulai dari anggota maupun materi.

“Ya, eeh pertama kali Perppu Ormas itu dikeluarkan, hal yang paling saya lakukan dulu menghubungi senior "ini gimana?", sebelum anggota tanya-tanya (terkait Perppu Ormas) termasuk juga sesepuhnya HTI di Malang seperti ketua-ketuanya gitu saya tanyakan. Maka kita tunggu

instruksi dari pusat lalu kita sampaikan. Paling dulu kita sebar di WA bahwa semuanya jangan bereaksi, baik langsung maupun di medsos. Kalo ditanya orang siapapun itu, kita sampaikan "kita masih mengkaji". Tapi dulu itu ga lama (Pasca Perppu Ormas) satu hari 2 hari itu sudah keluar sikap kita kalau Perppu Ormas itu dipaksakan dan macam-macam sebagainya. Ya karena apa yo, terutama yang masih muda-muda, karena dihubungi keluarga dan macam-macam disuruh gausah ikut-ikutan segala macam."

(Hasil wawancara HNA 27 Maret 2019 Pukul 15.27 WIB)

Keempat, yaitu GEMA Pembebasan itu sendiri. GEMA Pembebasan Malang merupakan komisariat yang ada di Kota Malang. Ada GEMA Pembebasan yang bergerak di kota, provinsi, dan nasional lainnya yang bersifat hierarkis. Perangkat-perangkat ini berbagi sumber daya satu sama lain untuk melakukannya gerakan. Lalu, distribusi Buletin Pembebasan dari GEMA Pembebasan Jawa Timur ke GEMA Pembebasan Malang. Hal ini sebenarnya sangat umum dipakai organisasi lain untuk menciptakan birokrasi gerakan.

5.2. Mobilisasi Sumber Daya GEMA Pembebasan Malang

Oberschall dalam Sukmana (2016) mendefinisikan mobilisasi sumber daya sebagai bentuk ketidakpuasan dalam suatu masyarakat, maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Ketidakpuasan terhadap kondisi Indonesia dan kekecewaan terhadap pemerintah saat ini menjadi dasar gerakan GEMA Pembebasan Malang. Hal ini karena kondisi umat yang menggunakan ide-ide di luar Islam sebagai pegangan hidup dan pemerintah yang membubarkan HTI sebagai penegak syariat Islam. Aktivitas GEMA Pembebasan Malang pasca pembubaran HTI merupakan upaya untuk mempertahankan dan meneruskan penegakan syariat Islam. Selain itu untuk mempertahankan eksistensi gerakan mereka akibat wacana pelarangan penegakan khilafah Islamiyah.

Aktivitas GEMA Pembebasan Malang juga merupakan bentuk koreksi atas kinerja pemerintah. Kegiatan-kegiatan GEMA Pembebasan Malang untuk menyadarkan bahaya dari ide-ide seperti liberalisme, komunisme, dan sekulerisme. Termasuk sistem demokrasi yang menjadi pusat permasalahan yang terjadi di negeri ini. Fokus-fokus itu yang menjadi gerakan GEMA Pembebasan Malang. Selayaknya organisasi mahasiswa yang menjadi oposisi abadi pemerintah.

“Kita tetap menjadi apa yang omek lakukan yaitu jadi oposisi abadi kan seperti itu. Ya kita istiqomah melewati jalan-jalan sana. Tidak memihak pada rezim... Cuma posisi kita sebagai pengoreksi pemerintah. Kalo dalam Islam kita tidak bisa dikatakan sebagai oposisi, cuma mengoreksi saja kan kewajiban kita sebagai mahasiswa kan.”

(Hasil wawancara TSP 17 April 2019 Pukul 19.45 WIB)

Dibutuhkan kerangka konseptual untuk melihat proses terjadinya gerakan GEMA Pembebasan Malang. Oberschall dalam Sukmana (2016) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dasar rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam gerakan sosial. Faktor-faktor tersebut, yaitu:

1. Organisasi Gerakan Sosial

Organisasi gerakan sosial merupakan organisasi identitas yang bersifat kompleks atau formal, untuk mencapai tujuan dari implementasi gerakan (Sukmana, 2016). Dalam gerakan sosial kontemporer, GEMA Pembebasan Malang perlu memiliki organisasi gerakan sosial sebagai aktor kunci. Keberhasilan dan kegagalan gerakan GEMA Pembebasan Malang tergantung atas seberapa banyak orang yang tergabung dalam organisasi. Orang-orang

tersebut perlu diarahkan, melakukan pengorbanan, dan bertahan terhadap pihak lawan.

Sebagai organisasi gerakan sosial, GEMA Pembebasan Malang berisikan mahasiswa secara umum dan anggota maupun simpatisan HTI terutama dalam struktur organisasi. Ketua GEMA Pembebasan Malang saat ini ditempati oleh HNA sebagai Ketua Umum yang juga anggota HTI. Penempatan posisi anggota atau simpatisan HTI sebagai bentuk jaringan dari HTI. Pengurus organisasi GEMA Pembebasan Malang perlu diisi oleh anggota HTI sebagai bentuk dominasi agar tidak mengalami penyimpangan. Langkah ini juga untuk mengurangi resistensi gerakan melalui bentuk kooptasi.

Untuk melakukan aktivitasnya, seluruh komisariat setiap kampus di gerakkan. Jika sebelumnya GEMA Pembebasan Malang memiliki 4 komisariat kampus di antaranya, Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Kanjuruhan Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang hanya tersisa dua kampus saja, yaitu Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Brawijaya UB pasca pembubaran HTI.

Sejak awal, UM menjadi basis gerakan GEMA Pembebasan Malang karena anggota terbanyak ada di kampus tersebut. Pendiri GEMA Pembebasan juga berasal dari UM. Komisariat UM dan UB sudah mempunyai jaringan organisasi dalam kampus sehingga masih bisa bertahan. Ini erat kaitannya dengan mobilisasi anggota GEMA Pembebasan Malang untuk mengikuti kegiatan di dalam kampus. Tetapi komisariat UB masih memperbaiki sistem

organisasinya sehingga agendanya mengikuti GEMA Pembebasan Malang dan komisariat UM.

Dari setiap komisariat tersebut jumlah anggotanya dan nama ketua masih di rahasiakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini berkaitan dengan resistensi yang diterima GEMA Pembebasan Malang. Beberapa media sosial dari masing-masing komisariat kampus juga ditutup. Kondisi GEMA Pembebasan di kampus lain berkaitan dengan jumlah anggota yang tidak terlalu banyak dan represi dari kampus lebih tinggi karena beberapa merupakan kampus swasta. Untuk menangani hal tersebut bagi mereka yang ingin bergabung dikumpulkan di GEMA Pembebasan Malang atau komisariat UB.

“Kita ada Komsat UM sama UB. Iya ada dua, kita fokuskan di dua itu sih. Kemarin di UM sekalian dibikinkan aja di UB gitu. Terus dipegang sama GP Kota Malang. Setelah GP Malang ada GP Jawa Timur. Habis itu GP secara nasional. Yang sekarang ini tapi UB kan eeh... di UB ini sedang ada eeh... kita perbaikilah sistemnya disana. Jadi secara, ketua di UB ini belum ada. Karena kita masih memperbaiki sistem di UB. Kalo di UM Sudah berjalan, cuma yang di UB ini belum ada. Ya akhirnya ya secara agenda yang mengikuti UM sama Malang.”

(Hasil wawancara TSP 17 April 2019 Pukul 19.45 WIB)

2. Pemimpin di GEMA Pembebasan Malang

Menurut Moris (Sukmana, 2016) pemimpin sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesepakatan-kesepakatan, menyusun strategi, membingkai tuntutan, dan mempengaruhi hasil. Pemimpin memiliki risiko dan

tanggung jawab yang lebih besar. Namun, mereka juga akan menerima keuntungan paling besar atas keberhasilan gerakan sosial.

Pimpinan di GEMA Pembebasan Malang saat ini diisi oleh HNA dengan masa jabatan 2 tahun. HNA berasal dari Jombang dan tidak berasal dari keluarga HTI, namun berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama. Tetapi secara mandiri ia ikut melibatkan diri ke dalam HTI. Pemilihannya sebagai Ketua Umum bukan karena karismatik, tetapi lebih pada profesionalitas. TSP mengaku pemilihan HNA hanya karena ia dibutuhkan dan loyal sejak di Komisariat UM. Karena profesionalitas yang menjadikan HNA sebagai pemimpin, loyalitas anggotanya tidak tertuju padanya, tetapi ide-ide dan hasil dari kegiatan yang dilakukan di GEMA Pembebasan Malang.

Pemimpin perlu sumber kekuasaan untuk mempengaruhi orang. Untuk memimpin HNA mengetahui atas tugas-tugas dalam menggerakkan GEMA Pembebasan Malang. Selain itu, penting untuk memberikan ganjaran atau hadiah ketika menegakkan syariat Islam dan bukan dari pemimpinnya. Hadiah tersebut dikemas dengan wacana kejayaan umat Islam karena telah menjadi janji Allah dan ia tidak akan ingkar.

Ketua Umum GEMA Pembebasan mempunyai beberapa tugas sentral. Ketua GEMA Pembebasan Malang menjadi penanggung jawab seluruh kegiatan dan urusan baik internal maupun eksternal, mempertanggung jawabkan hasil kerja kepengurusan hingga memberikan pernyataan atas nama

organisasi terhadap suatu permasalahan. Tetapi tugas paling penting yaitu mempertahankan dan meneruskan penegakan ideologi Islam di Indonesia.

HNA cukup vokal dalam menyuarakan tentang pentingnya khilafah. Ia sering menawarkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia. Pasca pembubaran HTI, bersama GEMA Pembebasan Malang ia membangun wacana #JanganPilihRezimZalim. Ia juga menjadi penghubung dengan beberapa gerakan di Malang dalam beberapa aktivitas GEMA Pembebasan Malang.

3. Sumber daya Gerakan GEMA Pembebasan Malang

Salah satu faktor determinan dalam suatu gerakan sosial yaitu sumber daya dan mobilisasinya. Untuk mempertahankan gerakannya, GEMA Pembebasan Malang perlu memiliki sumber daya moral, kultural, organisasi sosial, manusia, dan material. Sumber daya menjadi ukuran seberapa kuat gerakan dapat berlangsung.

Pertama, sumber daya moral yang merupakan bentuk legitimasi, dukungan simpati, dan dukungan dari orang atau tokoh terkenal. Meskipun tidak ditujukan terhadap GEMA Pembebasan Malang, namun hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional IV memberikan angin segar bagi gerakan penegakan syariat Islam. Forum yang dihadiri oleh berbagai ulama, tokoh, dan ormas Islam di Indonesia menghasilkan 4 pertimbangan dan 8 keputusan. Dalam pertimbangan forum tersebut telah sepakat bahwa penerapan syariat dan penegakan serta Amar Maruf Nahi Munkar adalah kewajiban agama Islam. Ini menjadi bentuk legitimasi bahwa gerakan yang telah dijalankan GEMA

Pembebasan Malang merupakan kewajiban semua umat Islam dan harus diperjuangkan. Pertimbangan tersebut tidak perlu diherankan karena yang berbicara adalah ulama, bukan mahasiswa. Ulama yang ada forum tersebut sepakat untuk menegakkan khilafah yang merupakan warisan Nabi Muhammad. Pertimbangan ini memunculkan semangat juang bagi GEMA Pembebasan Malang yang ingin menegakkan syariat Islam.



Sumber: Instagram @gp.malang.raya

Gambar 16 Undangan Aksi 299

Pada tahun 2017 tepatnya 29 September terdapat Aksi 299 yang diselenggarakan oleh Alumni 212. Aksi tersebut berisikan tuntutan yang berjudul Resolusi Aksi Bela Islam 299 terkait Perppu Ormas dan Kebangkitan PKI. GEMA Pembebasan memanfaatkan para alumni 212 untuk bergabung bersama mereka karena dianggap mempunyai kesamaan pandangan terhadap kondisi politik Indonesia. Poin terkait penolakan Perppu Ormas merupakan salah satu kebijakan yang ditentang oleh GEMA Pembebasan Malang.

Terdapat Juru Bicara Presidium Alumni Aksi 212 sebagai pembaca tuntutan dan perwakilan Partai Gerindra, PKS, serta PAN sebagai perwakilan DPR yang menerima tuntutan tersebut. Ketiga partai ini setuju akan menolak Perppu Ormas. Meskipun aksi ini tidak melibatkan langsung GEMA Pembebasan Malang, hal ini menjadi dukungan solidaritas dan simpati dari para tokoh maupun partai politik.

Kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada dalam gerakan ini tidak dapat lepas dari partisipasi individu yang didasari motivasi. Motivasi untuk tetap menegakkan syariat Islam karena pemerintah telah dzalim terhadap umat Islam. Meskipun mendapat tekanan dari pihak berwenang, tapi ajaran dari Rasulullah tidak boleh hilang. Perjuangan penegakkan syariat Islam akan mencapai titik kejayaannya karena telah dijanjikan oleh Allah. Motivasi kedua, untuk mempertahankan eksistensi organisasi sosial GEMA Pembebasan Malang. Adanya organisasi GEMA Pembebasan Malang dengan bentuk birokrasinya menjadikan gerakan lebih efektif. Selain itu, GEMA Pembebasan Malang tidak sendiri karena ada Komisariat GEMA Pembebasan lain yang ada di seluruh Indonesia dan saling berkoordinasi. Ketiga adanya motivasi kepentingan politik untuk menggantikan sistem demokrasi dengan sistem khilafah. Permasalahan umat dan penerapan Islam secara kaffah hanya bisa diterapkan dalam khilafah Islamiyah.

“Lawan kita ya kedzaliman. Karena ya sekarang yang dzalim adalah penguasa. Lawan kita itu... Ajaran kita kan yang terkenal khilafah islamiyah padahal ajaran kita ideologi islam. Islam sebagai ideologi. Tujuan kita bukan menegakkan khilafah tapi melanjutkan kehidupan islam dengan menerapkan syariat Islam. Cuma di thariqoh kita

syariat Islam itu hanya bisa diterapkan dengan khilafah. Tidak bisa dengan negara republik, federal, atau negara-negara lain.”

(Hasil wawancara HNA 27 Maret 2019 Pukul 15.27 WIB)

Sumber daya manusia GEMA Pembebasan Malang didapatkan melalui proses rekrutmen yang sudah dijelaskan di awal, melalui pendekatan personal, halaqah, kajian, dan Training Pembebasan. Melalui kegiatan tersebut, doktrin penegakan syariat Islam tertanam dalam aktivis GEMA Pembebasan. Mereka menganggap bahwa dakwah merupakan kewajiban seumur hidup bagi setiap muslim meski ada tekanan dari pemerintah sekalipun.

Setiap minggu melalui halaqah, mereka dievaluasi sejauh mana perkembangan dakwah mereka, hingga sudah berapa orang yang mereka dekati. Setiap anggota yang sudah memenuhi syarat, dituntut untuk mendapatkan peserta baru yang akan dibina dan menciptakan halaqah baru. Melalui halaqah mereka secara intens mempelajari pikiran-pikiran dari kitab-kitab yang telah ditetapkan. Meskipun mereka mempunyai kegiatan kuliah, mereka harus mampu menyeimbangkan waktu mereka kuliah, mengikuti halaqah mingguan, menyebarkan dakwah, dan melakukan perekrutan.

Kegiatan halaqah menjadi kegiatan penting sebagai motor penggerak GEMA Pembebasan Malang. Para pembina halaqah bertugas untuk menjaga pemahaman anggotanya agar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan seperti kitab *Nizham Al-Islam* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011). Pembina lebih banyak menjadi penyambung lidah kitab-kitab yang sudah ditentukan daripada mendorong untuk berpikir

kritis. Sehingga perspektif yang digunakan adalah perspektif pembinanya. Dengan cara tersebut kesatuan pemikiran di antara anggota bisa dipelihara.

Ketiga, Sumber daya materiil sebagai alat bentuk untuk operasional gerakan. GEMA Pembebasan Malang mempunyai iuran dari para anggotanya sebagai dana operasional gerakan. Selain itu, dana GEMA Pembebasan Malang juga didapatkan dari GEMA Pembebasan Pusat. Jika ada kegiatan yang membutuhkan dana besar, GEMA Pembebasan Malang biasanya mengajukan proposal pengajuan dana kepada HTI Malang namun menghindari pengajuan dana kepada pemerintah. GEMA Pembebasan Malang menghindari dan sangat berhati-hati dalam menerima dana dari pemerintah, pengusaha, maupun luar negeri

“Sumber dana kita dari pusat, GP Nasional. Dari HTI dari sisi berdakwah sih sebenarnya, tidak banyak. Kita pas-pasan sih, kadang-kadang kas kita minus... Akhirnya kita minta pengajuan dana. Misalkan acara GP kita butuhnya satu juta atau dua juta ya kita ajukan pas dua juta itu. Proposal pengajuan dana GP masuknya ke kantor sana (HTI Malang).”

(Hasil wawancara TSP 17 April 2019 Pukul 19.45 WIB)

Selain memiliki media cetak propaganda sendiri, GEMA Pembebasan Malang juga mendapatkan media cetak dari HTI berupa majalah bulanan “Al-Wa’ie”, tabloid setiap 2 minggu “Media Ummat”, buletin setiap Jum’at “Kaffah”. Media ini disalurkan kepada GEMA Pembebasan Malang lalu dibagikan secara gratis, membeli, atau memberikan infaq. Meski dikabarkan telah berhenti pasca putusan terhadap HTI namun media ini tetap beredar di masyarakat. Tiga media cetak di atas disalurkan GEMA Pembebasan Malang

dilingkungan kampus atau kepada mahasiswa. Media-media ini menjadi salah satu sarana pelengkap bagi dakwah HTI yang didistribusikan ke GEMA Pembebasan Malang.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 17 Media Umat, Buletin Kaffah, dan Majalah Al-Wa'ie

Tulisan-tulisan di dalamnya berusaha untuk menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk menerapkan syariat Islam secara total dalam bingkai kepemimpinan Khilafah. Media ini telah berjalan di Indonesia sejak tahun 2000-an. Media ini berusaha untuk membahas seluruh urusan kehidupan umat muslim dalam bidang ekonomi, politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Pembahasan tersebut sebagai bentuk kritik atau ungkapan terhadap kekeliruan, kesalahan, dan kegagalan sistem yang ada di luar Islam. Tidak hanya mengkritik, tetapi memberikan solusi yaitu sistem yang berdasarkan syari'at Islam.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

GP Malang sebagai organisasi gerakan sosial berafiliasi secara politik dan ideologi dengan HTI. Kehadiran GP Malang agar mampu meraih dan bersentuhan langsung dengan mahasiswa di Kota Malang. Mereka mampu mengurangi beban dan tugas-tugas organisasi induknya khususnya di lingkungan kampus. Dengan adanya hubungan kedua organisasi tersebut, dapat membantu mensosialisasikan dan melaksanakan program kerja serta mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial.

Gerakan yang dilakukan oleh GP Malang merupakan dakwah yang berarti mengajak orang untuk kembali pada ajaran Islam. Tujuan dilakukan dakwah tersebut untuk mengajak mahasiswa kembali kepada Islam secara kaffah. Pada dasarnya tujuan gerakan GP Malang saling bersinggungan dengan HTI. Dakwah yang dilakukan bukan hanya untuk melakukan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk kegiatan sehari-hari, tetapi juga menegakkan negara Islam berdasarkan Khilafah Islamiyah. Dalam pandangan mereka hukum-hukum Islam hanya dapat dijalankan pada sistem khilafah. Gerakan yang dilakukan GP Malang ini menjadi alasan pemerintah membubarkan HTI. Pembubaran HTI membuat gerakan GP Malang untuk mempertahankan ajaran syariat Islam dan tetap mencapai tujuan tegaknya Khilafah Islamiyah.

Pasca pembubaran HTI, GP Malang berada pada tahapan kemunduran dalam gerakan sosial. Namun bukan berarti pada tahap kemunduran, GP Malang tidak

dapat bertahan. GP Malang mengalami kemunduran karena adanya tekanan dari pihak eksternal terutama pemerintah. Terdapat resistensi yang muncul dalam gerakan GP Malang. Resistensi ini berbentuk penolakan dari pihak yang tidak menyukai GP Malang, ejekan, serta bentuk kontrol sosial dari pemegang wewenang di kampus-kampus yang ada di Malang

Gerakan GP Malang dilandasi adanya faktor kekecewaan terhadap sikap dan kebijakan politik dari negara. Negara dianggap tidak mampu mensejahterakan rakyat dan dzalim terhadap Islam. Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan GP Malang memilih jalan untuk menjadi oposisi pemerintah selayaknya organisasi mahasiswa. Kegiatan oposisi ini untuk mengoreksi dan menyadarkan pemerintah.

Untuk dapat melakukan gerakannya GP Malang membuat taktik gerakan dengan mempertahankan program kerja yang sudah ada sebelumnya. Program kerja tersebut dianggap mampu dan efektif untuk mencapai tujuan gerakan pasca pembubaran HTI. Program kerja tersebut antara lain yaitu Training Pembebasan, Halaqah, Opini Tempel, Media Pembebasan, Dialogika, dan Aksi.

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam gerakan sosial. GP Malang sendiri merupakan organisasi identitas yang bersifat formal yang memiliki anggota. Dalam gerakan sosial, organisasi sosial merupakan aktor kunci. Di dalamnya terdapat beberapa aktor untuk menginspirasi komitmen anggotanya, memobilisasi sumber daya, menyusun strategi, menciptakan kesepakatan, dan mempengaruhi hasil gerakan GP Malang. Terdapat jaringan penting yang membantu jalannya gerakan GP Malang, yaitu HTI,

Muslimah HTI, dan BKLDK. Jaringan-jaringan tersebut terdapat mobilisasi sumber daya antara lain materi, manusia, organisasi sosial, dan moral.

6.2. Saran

Berdasarkan interpretasi dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran untuk pembaca yang memiliki tujuan untuk melanjutkan kajian mengenai gerakan GEMA Pembebasan pasca pembubaran HTI di Kota Malang. Adapun saran dari peneliti, yaitu:

1. Perlu dilakukan kajian mengenai kesadaran rasional para anggota GP Malang dalam mencapai tujuan gerakan mereka pasca pembubaran HTI.
2. Pada penelitian ini ditemukan bahwa anggota GP Malang lebih banyak berada di Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya. Maka perlu diperlukan pembuktian terkait anggota GP Malang di kampus lain dan diperkuat dengan penelitian lanjutan.
3. Penelitian ini hanya dilihat dari sisi GP Malang, sementara dibutuhkan argumentasi lain yang perlu dilihat dari kelompok yang terlibat dengan GP Malang. Seperti HTI, BKLDK, Muslimah HTI, maupun komunitas atau organisasi lainnya.
4. Dalam kebijakan pemerintah, baru HTI yang terkena dampak karena alasan penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Maka perlu dilihat dampak kebijakannya terhadap organisasi masyarakat lain atau komunitas yang tidak terikat hukum dengan pemerintah seperti GP Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qohar, K. M. (2017). Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran. *Kalam Volume 11 Nomor 2 Desember*, 365-396.
- Abdurrahman, H. (2005). Hizbut Tahrir Masuk Parlemen Mengapa Tidak? *Majalah Hidayatullah*, 42.
- Abidin, Z. (2010). *Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Organisasi Islam Ekstra Parlementer di Indonesia Pasca Reformasi*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Amal, T. A. (2004). *'Politik Syariat Islam' dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Arifan, F. A. (2010). *Pandangan Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Malang Tentang Metode Ijtihad HTI Dalam Bidang Politik dan Ibadah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Asmara, N. (2012). *Karakteristik Varian Fundamentalisme Islam di Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Gerakan Fundamentalisme Islam di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Chaidherrahman, M. (2015). *Gerakan Mahasiswa Pembebasan di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David A Snow, S. A. (2004). *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Balckwell Publishing Ltd.
- Fherastama, Y. (2018). *Persaingan Kelompok-Kelompok Islam dalam Praktek Keagamaan Pendidikan di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya*. Malang: Universitas Brawijaya.
- GEMA Pembebasan. (2012, 10 5). *Sejarah Berdiri*. Diambil kembali dari Official Website: GEMA Pembebasan: <http://gemapembebasan.or.id/statis-1-sejarah.html>
- GEMA Pembebasan. (2012, 05 10). *Visi & Misi*. Diambil kembali dari Official Website: GEMA Pembebasan: <http://gemapembebasan.or.id/statis-5-visi-misi.html>
- GEMA Pembebasan Malang. (2019, Mei 27). *Pernyataan Sikap GEMA Pembebasan Kota Malang: Tolak OBOR! Alat Penjajahan Cina Kapitalis*. Diambil kembali dari Facebook GEMA Pembebasan Malang:

https://www.facebook.com/gp.malang/posts/403775583591124?__tn__=K-R

- Hilmy, M. (2011). Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *ISLAMICA Vol. 6 No. 1 September*, 1-13.
- Hizbut Tahrir Indonesia. (2009). *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*. Jakarta: HTI-Press.
- Humas Administrasi Hukum Umum. (2017, Juli 19). *Siaran Pers : Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum: <http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1625-siaran-pers-kewenangan-legal-administratif-kemenkumham-sebagai-tindak-lanjut-perppu-nomor-2-tahun-2017>
- Jamilah, S. (2015). Gerakan Hizbut Tahrir di Kota Pare-Pare (Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani). *Jurnal Diskursus Islam Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015*, 1-19.
- Kennedi, J. (2012). Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Dakwah & Komunikasi, Komunika Vol. 6 No. 1* , 3.
- Khadafi, A. (2017, Mei 8). *Sejarah Kemunculan HTI Hingga Akhirnya Dibubarkan*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-kemunculan-hti-hingga-akhirnya-dibubarkan-coiC>
- Khariri, A. H. (2014). *Gerakan Fundamentalis Di Perguruan Tinggi islam (Studi: Pola Gerakan Dan Strategi Kaderisasi Hizbut Tahrir Indonesia di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kresna, M. (2017, Juli 21). *Cara Dakwah HTI Memikat Pengikut dan Simpatisan di Kampus*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/cara-dakwah-hti-memikat-pengikut-dan-simpatisan-di-kampus-cs9d>
- Locher, D. A. (2002). *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Lufaei. (2018). Membaca Gerak Dakwah Gerakan Mahasiswa Pembebasan: Sisi Politis dan Efeknya. *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 103-116.
- Macionis, J. J. (1999). *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Maulia, S. T. (2017). *Persepsi Organisasi Mahasiswa GEMA Pembebasan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila (Studi Kasus Nilai-Nilai Pancasila pada*

- Organisasi Mahasiswa GEMA Pembebasan di Kota Bandung*). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Merdeka.com Malang. (2017, Juli 28). *Mahasiswa di Kota Malang Potensi Jadi Target Paham Radikalisme*. Diambil kembali dari Merdeka.com Malang: <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/mahasiswa-di-kota-malang-potensi-jadi-target-paham-radikalisme-1707285.html>
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nottingham, E. K. (1985). *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI. (2011). *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- radarmalang.id. (2017, Juli 23). *Kampus Bersih-Bersih Dosen HTI*. Diambil kembali dari Radar Malang: <https://radarmalang.id/kampus-bersih-bersih-dosen-hti/>
- Republika. (2015, Oktober 21). *Malang Menjadi Wilayah Eksotik Gerakan Radikal*. Diambil kembali dari Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/21/nwjus3334-malang-menjadi-wilayah-eksotik-gerakan-radikal>
- Ro'uf, A. M. (2007). Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru. *Ulumuna Volume XI Nomor 1 Juni*, 157-176.
- Safari, R. (2018). *Wacana Fundamentalisme dalam Kita "Nizham Al-Islam"*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Setyawan, F. A. (2017, Agustus 17). *Selimut Khilafah di Kampus Negeri*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814135918-20-234603/selimut-khilafah-di-kampus-negeri>
- Shobron, S. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. *Journal Profetika Juni Voume 15 No. 1*, 44-62.
- Singh, R. (2010). *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi: SAGE Publikations India, Ltd.
- Sofiuddin. (2017). *Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia: Mampukah Menjadi Gerakan Dakwah?* Tangerang: 2017.

- Sohim, A. M. (2013). *Dakwah Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GEMA Pembebasan) Semarang dalam Menyebarkan Ideologinya di Kalangan Mahasiswa UNDIP*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Stephen P Robbins, T. A. (2012). *Organizational Behavior (Arab World Edition)*. London: Pearson Education Limited.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sumbulah, U. (2007). Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang Studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea. *Istiqro' Vol. 6 No. 1*, 3-47.
- Terakota.id. (2018, Mei 15). *Jejak Radikalisme dan Terorisme di Malang*. Diambil kembali dari Terakota.id: <https://www.terakota.id/jejak-radikalisme-dan-terorisme-di-malang/>
- Wiwoho, B. (2017, Juli 7). *'Hantu Khilafah' Pasca Pembubaran HTI*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170724073604-20-229848/hantu-khilafah-pasca-pembubaran-hti>

LAMPIRAN



GUIDE INTERVIEW

Waktu Wawancara :

Nama :

Keanggotaan di GP/HTI :

No. Ponsel :

1. Apa itu GEMA Pembebasan dan apa kegiatannya?
2. Kapan GP berdiri di Malang? (Kemunculan)
3. Berapa jumlah anggota/pengurus cabang di Kota Malang?
4. Program kerja apa yang dilakukan?
5. Tujuan apa yang ingin dicapai? Menegakkan khilafah, menerima ajaran islam secara keseluruhan, atau seperti apa?
6. Untuk menimbulkan citra positif apa yang dilakukan?
7. Gerakan GP Kota Malang termasuk dalam kategori dan tipe gerakan apa?
8. Siapa orang yang dianggap khilafah/amir/ketua di dalam GP Malang? Mengapa ia bisa menjadi pemimpin? (MRT)
9. Bagaimana dengan anggota lainnya? Apa tugasnya? (MRT)
10. Bagaimana bentuk struktur organisasinya? Siapa saja yang ada di dalamnya? (Tahap birokratisasi)
11. Berapa anggaran untuk menjalankan organisasi? Bagaimana mendapatkan dana tersebut? (MRT)
12. Hal atau cara apa yang menjadi penentu keberhasilan gerakan?
13. Siapa orang/organisasi/partai politik yang mendukung gerakan GP di Kota Malang? Bentuk dukungan apa yang diberikan? (MRT) (Proses Politik)
14. Apa pandangan mahasiswa/organisasi/partai politik terhadap GP?
15. Apakah sedang mengalami kemunduran dalam menjalankan GP Malang?
16. Siapa orang/organisasi/partai politik yang menentang atau menolak gerakan GP di Kota Malang? Penolakan apa yang diberikan? (MRT)
17. Dalam sistem kemahasiswaan di kampus, apakah GP juga terlibat dalam Pemira? (Proses Politik)
18. Mengapa ikut campur dalam pemira? Bukannya GP mengharamkan demokrasi? (Proses Politik)
19. Dalam Pemilu atau Pilkada, bagaimana sikap GP? Bagaimana dengan Pemilu 2019? (Proses Politik)

